



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH RAPAT

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPRRI DENGAN BPH MIGAS

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 33 (Tiga Puluh Tiga)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.45 s.d.12.23 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPRRI, Gedung Nusantara, Jakarta
- Ketua Rapat : Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
- Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPRRI
- Acara : 1. Evaluasi pengawasan distribusi BBM subsidi selama bulan Ramadan dan libur lebaran Tahun 2022.
2. Strategi dalam penanganan penyimpanan BBM Subsidi.
3. Progres digitalisasi SPBU dalam rangka pengawasan pendistribusian BBM.
4. Lain-lain.
- Hadir : 33 orang anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPRRI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPRRI:

PIMPINAN :

1. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

5 orang anggota dari 11 anggota:

1. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
2. Mercy Chriesty Barends, S.T.
3. Adian Yunus Yusak Napitupulu
4. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
5. Ismail Thomas, S.H., M.Si.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

7 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam
2. Drs. H.M. Gandung Pardiman, M.M.
3. Drs. Mukhtarudin
4. Ir. Lamhot Sinaga
5. Bambang Hermanto, S.E.
6. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A, M.Sc.
7. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto, S.Sos.
2. R. Wulansari
3. Ramson Siagian
4. Katherine A. Oendoen
5. H. Nurzahedi, S.E.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
2. Rian Firmansyah, S.Pd.
3. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
2. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo
2. Zulfikar Hamonangan, S.H.
3. Muhammad Nasir, S.H.
4. Rusda Mahmud
5. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. H. Rofik Hananto, S.E.
3. Hj. Nur Azizah Tahmid, B.A, M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
2. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Erika Retnowati A.K., M.Si. (Kepala BPH Migas)
2. Ir. Eman Salman Arief, M.B.A. (Komite BPH Migas)
3. Abdul Halim, S.Si. (Komite BPH Migas)
4. Wahyudi Anas, S.T. (Komite BPH Migas)
5. Ir. Basuki Trikora Putra (Komite BPH Migas)
6. Iwan Prasetya Adhi, S.E. (Komite BPH Migas)

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII/F.GERINDRA):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII yang hadir secara *virtual*.

Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI, baik yang hadir fisik maupun secara *virtual*.

Yang kami hormati Ibu Kepala BPH beserta seluruh Anggota Komite BPH serta jajaran BPH Migas dan juga hadirin sekalian.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat dengar pendapat secara protokol kesehatan, baik fisik maupun secara *virtual meeting* guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesediaan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI untuk mengikuti rapat dengar pendapat pada pagi hari ini.

Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPRRI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021/2022, maka pada hari ini Komisi VII DPRRI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPH Migas dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan beberapa agenda, sebagai berikut:

1. Evaluasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi selama bulan Ramadan dan libur lebaran tahun 2022,
2. Strategi dalam penanganan penyimpanan BBM bersubsidi,
3. Progres digitalisasi SPBU dalam rangka pengawasan pendistribusian BBM, khususnya BBM bersubsidi,
4. Lain-lain.

Dan berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPRRI yang telah hadir berjumlah 22 anggota dari 52 Anggota Komisi VII DPRRI, yang terdiri dari 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian, sebagaimana

ditentukan dalam Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup oleh karena itu atas nama Pimpinan Sidang, saya meminta persetujuan anggota Komisi VII agar rapat ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apakah dapat disetujui?

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami minta persetujuan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII bahwa rapat ini akan diselesaikan pada pukul 13.00 WIB dan apabila diperlukan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati dan juga mitra kerja Komisi VII yang juga kami muliakan.

Bulan Ramadan dan libur lebaran tahun 2022 merupakan tahun pertama pemerintah memperbolehkan pelayanan mudik libur Idul Fitri setelah 2 tahun terakhir terkendala akibat adanya pandemi Covid-19. Konsekuensi logis dari hal itu adalah terjadinya peningkatan konsumsi bahan bakar minyak dan juga gas selama momentum perayaan Ramadan dan Idul Fitri. Hal lain juga kami masih mendapat beberapa laporan dari masyarakat terkait kasus penyelewengan BBM bersubsidi, khususnya solar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Disparitas harga yang tinggi antara solar bersubsidi dengan solar nonsubsidi menyebabkan adanya potensi penyelewengan solar subsidi ke sektor tertentu yang tidak berhak mendapatkannya.

Hal tersebut sangat merugikan keuangan negara karena kita paham bahwa subsidi ini setiap tahun kita berikan dari APBN dan ini sangat membebani APBN. Namun, bagaimanapun pemerintah juga harus memikirkan masyarakat terlebih daya, daya jangkau, daya beli masyarakat sekarang lagi agak menurun, maka itu subsidi masih tetap diberikan kepada masyarakat. Namun, kita tidak menginginkan bahwa subsidi tersebut disalahgunakan dan diambil keuntungan karena adanya disparitas harga yang cukup mencolok, harga antara solar bersubsidi dengan solar industri khususnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah terutama untuk mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi adalah digitalisasi SPBU. Penerapan IT *Nose/* yang mencatat transaksi pembelian EDC lengkap dengan nomor polisi dan dimonitor melalui perangkat video analitik menjadi hal yang penting dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.

Nah, di sini kami juga ingin pemaparan Bapak/Ibu sekalian, bagaimana menganalisa satu mobil yang tadi saya sebut itu, mondar-mandir kalau hanya intinya identifikasinya dari plat nomor saja. Tadi disampaikan bahwa entar dilihat CCTV, seberapa banyak petugas BPH bisa, memelototi satu per satu jumlah ribuan SPBU dan tiap menit, tiap detik semua kendaraan masuk di situ.

Selain itu program digitalisasi tersebut juga dapat dimanfaatkan, apa manfaat dari ini terkait ketersediaan BBM. Jadi, kita beberapa waktu yang lalu kita melihat bahwa SPBU khususnya di dapil saya Pak, di Jawa Timur itu sampai nginep-nginep. Nah, ini betulkah nginep karena memang BBM-nya habis atautkah disembunyikan, ini yang harus kita alami dan juga bener nggak ini truk, bener nyata mereka yang ngantri atau emang dimobilisasi untuk menciptakan sebuah narasi agar ada tekanan publik terhadap pemerintah untuk memberikan BBM bersubsidi dengan berlimpah. Tapi, kita bukan berarti mengabaikan kepentingan masyarakat, kita utamakan tapi jangan masyarakat yang berhak di situ menjadi korban.

Maka itu kami pengin mendapatkan paparan terkait sistem digitalisasi yang digagas oleh BPH Migas terkait efektivitasnya, apakah betul, jangan sampai kita berbiaya besar namun tidak menyelesaikan masalah. Saya berharap bahwa BPH dengan konsep IT yang akan diterapkan bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti slogannya penggadaan, jangan menimbulkan masalah.

Baik, Bapak/Ibu yang saya hormati.

Selanjutnya, untuk efektifnya waktu maka kami persilahkan kepada Ibu Kepala BPH Migas, ini satu-satunya perempuan di antara arjuna-arjuna ini kan, untuk untuk dapat menyampaikan paparan terkait sesuai agenda kita di rapat dengar pendapat hari ini.

Waktu dan tempat kami persilahkan.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRRI.
Yang saya hormati Bapak Komite dan teman-teman dari BPH Migas.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Memenuhi agenda pada hari ini kami di sini akan memaparkan sesuai dengan permintaan, yang pertama yang terkait dengan pelaksanaan posko Ramadan dan Idul Fitri atau Rafi di tahun 2022. Posko nasional ESDM untuk Ramadan dan Idul Fitri tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 itu berlangsung selama 17 hari, yaitu sejak tanggal 25 April sampai dengan 11 Mei dipusatkan

di Kantor BPH Migas. Kepala BPH Migas mendapat penugasan sebagai ketua posko nasional sektor ESDM yang meliputi subsektor migas, kelistrikan dan juga kebencanaan geologi.

Adapun ketersediaan atau stok BBM selama masa ke posko nasional itu dalam kondisi yang normal, kemudian rata-rata *coverage day* atau CD BBM selama periode posko tanggal 25 April sampai dengan 11 Mei, antara lain untuk jenis ron 90 atau pertalite itu 17 hari, kemudian untuk solar atau CN48 21 hari dan untuk minyak tanah atau kerosin itu ada 41 hari. Kemudian selama masa periode Rafi tersebut layanan tambahan yang sudah disiapkan selama periode tersebut adalah SPBU siaga sebanyak 1.370, kemudian kios Pertamina siaga sebanyak 86 unit, motoris 339 unit, kemudian agen dan *outlet* elpiji siaga sebanyak 48.207 unit, kemudian disiapkan juga SPBU kantong yang berupa mobil tangki yang *stand by* itu sebanyak 154 unit dan juga ada fasilitas kesehatan di 14 lokasi.

Dan melalui sinergi dan kolaborasi dari Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kepolisian, TNI, Jasa Marga, Telkom, perbankan, pemda dan seluruh pihak lain yang terlibat, pelayanan operasional untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat dan pemudik sepanjang arus mudik arus balik dan saat Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Kemudian kami sampaikan juga di *slide* berikutnya mengenai kondisi penyaluran BBM selama posko. Secara nasional total gasolin pada arus mudik itu meningkat sebanyak 26% dan kenaikan tertinggi terjadi pada H-1 yaitu sebesar 36% dengan kenaikan yang terbesar itu ada pada jenis pertalite dengan peningkatan sebesar 46%. Sedangkan untuk total gasoil itu turun sebesar 13% terhadap sales normal. Kemudian pada saat arus balik terjadi peningkatan 12% terhadap sales normal dan untuk total gasoil itu turun 40% terhadap sales normal dan pada titik-titik tertentu sepanjang jalur mudik terjadi kenaikan yang sangat signifikan diatas 100% yaitu pada titik-titik penyaluran di wilayah Jawa Tengah.

Di dalam menyalurkan BBM pada saat posko itu terdapat pertimbangan-pertimbangan skala prioritas dalam pengiriman BBM terhadap SPBU yang mengalami peningkatan penyaluran secara signifikan. Kemudian juga PT Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha penugasan mengupayakan juga mitigasi risiko karena adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi di beberapa wilayah dan adanya potensi tanah longsor dengan menyiapkan RAE atau *regular alternative emergency* agar pendistribusian BBM dapat berjalan dengan lancar.

Kemudian berdasarkan data dari Jasa Marga arus balik pada periode Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 merupakan tertinggi sepanjang sejarah di mana lebih dari 170.000 kendaraan bergerak dari timur menuju Jabodetabek melalui tol atau naik sebesar 2,2% dibandingkan tahun 2019 dan sebesar 159% dibandingkan tahun 2021.

Badan usaha ritel bidang BBM terus memonitor agar stok dan distribusi di SPBU berjalan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan BBM sepanjang arus mudik dan balik. Terjadi peningkatan konsumsi yang tertinggi di wilayah Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Brebes itu mencapai 813 KL per hari atau meningkat 120% dibandingkan kondisi normal yang sebesar 368 KL per hari, yang diikuti kemudian dengan Kabupaten Kebumen mencapai 678 KL per hari atau naik 119% dibandingkan kondisi normal yaitu 309 KL per hari. Kemudian, di Kabupaten Tegal juga dijumpai kenaikan yang signifikan sebesar 743 KL per hari atau naik 102% dibandingkan kondisi normal 366 KL per hari.

Untuk angkutan udara Kementerian Perhubungan mencatat pergerakan pesawat dan penumpang di Bandara Internasional Soekarno Hatta mencapai rekor tertinggi sepanjang pandemi pada hari minggu atau H + 5 lebaran, yang tercatat sebanyak 1.130 penerbangan dengan 150.000 penumpang dan konsumsi avtur pada puncak arus balik meningkat hingga kurang lebih 24% secara nasional.

Bapak/Ibu sekalian,

Pada masa pelaksanaan posko Rafi dilaksanakan *monitoring* langsung ke lapangan, antara lain di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Bali dan Papua dengan hasil-hasil sebagai berikut. Bahwa kondisi stok BBM dan distribusi dalam menghadapi Rafi atau Ramadan dan Idul Fitri 2022 berlangsung aman. Kemudian adanya kenaikan pembelian BBM gasolin terutama BBM jenis pertalite telah disiapkan SPBU kantong, motoris dan modular dalam rangka persiapan mudik. Kemudian, juga Bapak Menteri juga langsung meninjau ke lapangan dan sudah meminta PT Pertamina untuk mengamankan tangki SPBU seoptimal mungkin, terutama jenis solar dan pertalite agar ditingkatkan posisi stoknya. Kemudian, juga Bapak Menteri meminta untuk memperhatikan *layout* di SPBU untuk mempercepat proses pengisian BBM. Kemudian, kami juga menjumpai beberapa pemda yang mengeluarkan surat edaran untuk pengendalian penyaluran JBT kepada konsumen.

Berikutnya, di sini kami tampilkan dokumentasi dari posko Rafi, posko nasional sektor ESDM ini meliputi sektor migas, kelistrikan dan kebencanaan geologi yang berpusat di kantor BPH Migas. Kemudian, masa posko itu dilaksanakan sejak 25 April sampai dengan 11 Mei setiap hari, mulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 18.00 WIB termasuk hari libur tentunya dan petugas posko ini merupakan petugas gabungan yang terdiri dari personil BPH Migas, Ditjen Migas, Ditjen Ketenagalistrikan, Badan Geologi, badan usaha sektor BBM, badan usaha sektor gas bumi dan badan usaha sektor kelistrikan. Dalam masa posko tersebut kami juga memonitor secara langsung penyaluran BBM di seluruh Indonesia melalui video *conference* dengan para GM seluruh Indonesia dan juga dengan PT ASDP dan juga dengan PLN.

Selanjutnya, Bapak/Ibu sekalian, agenda berikutnya adalah bagaimana strategi dalam penanganan penyimpangan untuk BBM bersubsidi. Jadi, dalam pelaksanaan pendistribusian JBT dan JBKP, BPH Migas melakukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan yang bertujuan agar JBT dan JBKP ini

bisa tepat sasaran. Adapun langkah-langkah pengendalian dan pengawasan tersebut adalah untuk langkah pengendalian, saat ini sudah diberlakukan beberapa aturan. Yang pertama, tentunya pengaturan yang terkait dengan konsumen pengguna itu diatur di dalam lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014, kemudian ada pengaturan mengenai *volume* penyaluran JBT solar untuk kendaraan angkutan darat sesuai dengan keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT solar untuk konsumen pengguna, transportasi kendaraan bermotor, untuk angkutan orang atau barang. Kemudian, juga ada aturan yang terkait dengan penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian JBT solar untuk usaha pertanian, usaha perikanan, usaha mikro dan layanan umum yang sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019.

Saat ini kami sedang menyusun beberapa revisi atas peraturan-peraturan tersebut untuk supaya penyaluran BBM ini bisa lebih tepat sasaran yaitu, yang pertama kami sudah mengajukan usulan revisi dari PP 191/2014 ini, ini sudah disampaikan oleh Menteri ESDM kepada presiden. Jadi, kami sedang menunggu pembahasannya, kemudian juga kami menyusun draf Peraturan BPH Migas yang nantinya akan menjadi peraturan pelaksanaan daripada perpres tersebut. Kemudian, juga kami sudah menyiapkan juga SK tentang pengendalian *volume* untuk BBM bersubsidi yang nanti akan kami terbitkan sebagai aturan pelaksanaan dari revisi perpres itu juga.

Kemudian untuk langkah-langkah pengawasan, yang pertama tentu kami melakukan pengawasan lapangan secara rutin oleh tim BPH Migas. Kemudian, juga dilakukan pemanfaatan IT dengan digitalisasi *nozzle*, kemudian juga kami mempunyai sistem yang bernama Silvia Sistem Informasi Pelaporan, Pengawasan, Pendistribusian BBM. Kemudian juga, kami bekerja sama untuk pengawasan ini dengan aparat penegak hukum. Jadi, kami mempunyai perjanjian kerja sama dengan TNI dengan bas, kemudian dengan Polri, kemudian dengan BRIN juga kami akan mempunyai kerja sama dan juga dengan Ditintelkam Polri. Kemudian, kami juga melakukan pengawasan terpadu bersama dengan Itjen Kementerian ESDM dan Ditjen Migas dalam tim gugus tugas pengawasan, penyediaan dan pendistribusian BBM. Kemudian juga, kami melakukan pengawasan bekerja sama juga dengan pemda.

Bapak/Ibu sekalian.

Di sini kami berikan juga contoh-contoh untuk pelaksanaan pengawasan tersebut. Jadi, setelah kami melakukan perjanjian kerja sama yang kami tanda tangani di bulan November kalau tidak salah, itu kami melakukan *workshop* dan sosialisasi dari nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut dengan beberapa kapolda. Di sini dilakukan di bulan November di 5 wilayah. Jadi, kami mensosialisasikan aturan-aturan yang terkait dengan BBM dan kemudian juga setelah dilakukan sosialisasi kami menyusun bersama SOP untuk pelaksanaan pengawasannya di lapangan.

Kemudian, juga hasil-hasil daripada pengawasan yang kami lakukan bersama dengan kepolisian di sini beberapa contoh, yang pertama di halaman yang di *slide* yang kami sampaikan itu adalah pengungkapan penimbunan solar

bersubsidi di Sulawesi Utara. Ini kasus penimbunan yang ditemukan bersama-sama oleh PPNS BPH dengan kepolisian, dan ini dugaannya adalah melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Kemudian yang lainnya, kami juga melakukan penindakan bersama dengan kepolisian dan ini bersama dengan PPNS juga yaitu di Polda Sumsel dan di sini ditemukan adanya barang oplosan ya, temuan barang bukti yang cukup besar waktu itu 108 ton yang kami temukan dan saat ini kasus itu sudah tahap persidangan di Pengadilan Negeri Palembang dan sedang dalam agenda pemeriksaan untuk keterangan-keterangan saksi.

Kemudian, berikutnya adalah contoh-contoh dari bagaimana kami melakukan pengawasan yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Jadi selain melakukan verifikasi *volume*, dari situ kita biasanya akan menemukan indikasi ya indikasi dari adanya penyimpangan-penyimpangan. Kita bisa menemukan dari data-data *dashboard* SPBU itu, misalnya ada pengisian yang berulang itu kita kemudian akan cek ke dalam rekaman CCTV-nya. Jadi, seperti itu. Kemudian, juga misalnya ada pengisian ke dalam jerigen yang tidak ada surat rekomendasi, itu kita bisa cek juga dari rekaman CCTV. Tentu saja kami tidak bisa melakukan pengecekan ke seluruh SPBU yang berjumlah 5.518 tetapi kami melakukannya secara sampling berdasarkan data hasil dari verifikasi *volume* secara *desk* ya, dan ini adalah beberapa temuan apabila kami ketemu hal-hal seperti ini. Kemudian, tentunya tidak kami apa namanya tidak kami masukkan sebagai *volume* yang mendapatkan subsidi. Artinya temuan-temuan itu kami koreksi dari *volume* yang kami usulkan untuk mendapatkan subsidi.

Ini di halaman berikutnya juga masih berupa temuan-temuan hasil pengawasan yaitu bisa kelihatan di situ ada pengisian ke dalam mobil yang tangkinya dimodifikasi, itu berapa, sering kami ketemu. Kemudian juga misalnya pengisian ke kendaraan mobil dinas ya atau plat merah itu kan juga tidak diperbolehkan. Jadi, hal-hal seperti ini kita tindak lanjuti dengan pemberian sanksi administrasi, berupa tidak diberikan subsidi artinya diperlakukan sebagai JBU. Kemudian kita tentu merekomendasikan adanya sanksi operasional yang diberikan oleh Pertamina kepada SPBU-nya itu tergantung tingkat kesalahannya. Jadi, mulai dari surat teguran, ada yang kemudian dikurangi kuotanya, bahkan ada juga yang ditutup, begitu. Kemudian juga beberapa kita lanjutkan dengan penyidikan oleh PPNS dan beberapa kita laporkan kepada APH dan ada juga yang kemudian oleh Pertamina dilaporkan kepada APH. Contohnya misalnya ada pengisian berulang seperti itu kan mengindikasikan adanya penimbunan, biasanya Pertamina juga melaporkan ke pihak kepolisian.

Kemudian, selama tahun 2021, itu kami sudah melakukan verifikasi *volume* dan menyampaikan kepada Kementerian Keuangan *volume* yang dimintakan subsidi dan hasil dari pengawasan kami, kami temukan adanya koreksi secara total ya untuk transportasi darat, kereta api, transportasi laut dan juga untuk perikanan. Koreksinya sebesar 9.033,780 KL atau jika dirupiahkan itu setara dengan kurang lebih 85 miliar.

Kemudian berikutnya dalam setiap kasus penyalahgunaan BBM yang dilakukan oleh aparat ataupun hasil kerja sama kami dengan aparat, BPH

Migas sebagai pemberi keterangan ahli bekerja sama dengan APH, baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan. Dan beberapa dokumentasi bisa kita lihat di sini adanya kerja sama kami dengan kepolisian, di mana teman-teman dari BPH Migas itu berlaku sebagai pemberi keterangan ahli.

Kemudian kalau kita lihat dari datanya, bahwa beberapa provinsi ini selalu menjadi provinsi dengan kasus terbesar ya, seperti di kita lihat di sini bahwa selama pemberian keterangan ahli di tahun 2022 ini Provinsi Jawa Timur, kemudian Jawa Barat dan Jambi merupakan 3 provinsi tertinggi terhadap jumlah barang bukti sebesar 257,455 liter, maaf 257.455 liter. Di mana 231.455 liter merupakan *volume* barang bukti yang memenuhi unsur pidana Pasal 54 dan 55 Undang-Undang 22 Tahun 2021 tentang Migas, dan tidak semuanya memang kemudian itu terbukti memenuhi unsur pidana, ada juga yang dari dugaan itu kemudian ternyata tidak memenuhi unsur pidana dan di sini ditemukan sebanyak 26.000.

Kemudian berikutnya dari penyimpangan-penyimpangan itu, terdapat beberapa jenis penyimpangan yaitu dari total dugaan sebesar 257.455 liter tersebut ada yang berupa penyimpangan dari BBM solar bersubsidi. Kemudian, ada yang berupa BBM oplosan. Kemudian, ada juga minyak tanah bersubsidi yang diselewengkan. Kemudian, ada juga penyalahgunaan dari BBM ron 90 pertalite, ini biasanya menjual tanpa izin. Kemudian, ada juga BBM solar nonsubsidi yang memenuhi unsur pidana, ini juga biasanya penjualan tanpa izin. Kemudian, ada juga memang yang tidak memenuhi unsur pidana sebanyak 26.000. Jadi, ini penyimpangan bisa berbagai macam modus.

Kemudian, dari kegiatan pemberian keterangan ahli selama 2021, itu kami sudah memberikan sebanyak 187 kasus di 2021, sedangkan di tahun, 187 kasus di 2021, dan di tahun 2022 BPH Migas telah memberikan keterangan ahli sebanyak 74 kasus. Kemudian, sebesar 81% terhadap jumlah dugaan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas berdasarkan kegiatan pemberian keterangan ahli pada triwulan pertama ini adalah berupa penyalahgunaan BBM bersubsidi sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Migas. Jadi, di sini ada 3 pasal yang terkait dengan penyalahgunaan BBM, yaitu Pasal 53, 54 dan 55 dari Undang-Undang Migas *juncto* yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Ciptaker. Di Pasal 53 ini adalah adanya kegiatan usaha hilir migas tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling tinggi 50 miliar.

Kemudian, untuk Pasal 54 yaitu setiap orang yang meniru atau memasukkan BBM dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar.

Kemudian, Pasal 55 Undang-undang Migas, bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar.

Dan berikutnya adalah di sini foto-foto daripada barang bukti pada kegiatan pemberian keterangan ahli.

Bapak/Ibu sekalian.

Berikutnya menginjak pada agenda selanjutnya yaitu yang terkait dengan progres digitalisasi SPBU dalam rangka pengawasan pendistribusian BBM. Jadi, dasar hukum dari program digitalisasi SPBU itu ada 3. Yang pertama adalah Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 38 P3JBT BPH Migas Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017. Kemudian, ada Surat Menteri ESDM Nomor 2548 tanggal 22 Maret 2018 dan juga itu disebutkan dalam Ratas Presiden RI dengan Menteri ESDM tanggal 14 Agustus 2018. Jadi, pada intinya bahwa program digitalisasi *nozzle* ini adalah berupa penugasan dari pemerintah kepada badan usaha yang ditugaskan.

Selanjutnya, kalau kita lihat di sini bagaimana progresnya, jadi program ini dibangun oleh Pertamina bekerja sama dengan Telkom berdasarkan penugasan pemerintah dan tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas data penyaluran BBM kepada konsumen, serta meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan BPH Migas terhadap kegiatan pendistribusian BBM di seluruh SPBU, khususnya yang menyalurkan JBT dan GBKP agar tepat sasaran. Jadi, kalau sesuai target, program ini dimulai 31 Agustus 2018, target penyelesaiannya untuk 5.518 SPBU bisa terdigitalisasi pada 1 Januari 2021. Jadi, kalau kita lihat progresnya untuk status 16 Juni, untuk 5.518 SPBU tersebut telah terpasang ATG atau *Automatic Tank Gate*, jadi kita bisa melihat stoknya ya *any time* gitu di situ kita ke SPBU kita bisa cek di situ berapa stok di SPBU tersebut, dan itu nanti terhubung dengan *dashboard*-nya. Kemudian juga sudah terpasang EDC di seluruh SPBU ada 5.518 SPBU itu sudah semuanya mempunyai EDC. Kemudian pencatatan nomor polisi itu sebanyak 4.300, kenapa 4.300 karena memang yang menyalurkan JBT tidak seluruhnya. Jadi dari 5.518 itu 4.303 SPBU itulah yang menyalurkan JBT, sehingga harus melakukan pencatatan nomor polisi melalui EDC.

Kemudian seluruhnya ini sudah terdigitalisasi dengan status BAST terdigitalisasi pada *dashboard* itu 4.300 sesuai dengan yang menyalurkan JBT. Kemudian, untuk kepatuhan 95% sedangkan untuk CCTV analitik ini memang tidak berupa video *analytical*, tapi dipasang akhirnya pada setiap SPBU itu berupa CCTV biasa bukan video analitik gitu ya. Kemudian tentu pertanyaannya apakah dari alat yang sudah terpasang itu, kami bisa memanfaatkan, memang belum 100% tetapi itu terus berprogres. Jadi, kami memanfaatkan data digitalisasi itu sebagai dasar untuk melakukan verifikasi *volume* yang akan kami mintakan subsidinya atau kompensasinya ke Kementerian Keuangan. Nah, dari data itu kita bisa melihat yang saya sampaikan tadi, misalnya adanya kejanggalan-kejanggalan karena itu kan terekam semuanya di situ ya kita bisa melihat misalnya adanya pengisian yang berulang dengan nomor polisi yang sama atau adanya pengisian yang melebihi 200 liter, kan maksimal untuk kendaraan roda 6 ke atas itu 200 liter itu kita bisa *trace* dari situ dan tentunya itu kemudian kami koreksi, tidak kita berikan

subsidiya. Dan lebih lanjut lagi dari situ kita bisa kemudian mengecek kepada rekaman CCTV dan itu nanti apabila memang diindikasikan ada penyelewangan kita tindak lanjuti dengan pelaporan ke APK ataupun kita lakukan penyidikan, seperti itu.

Jadi, kalau kita lihat dari 5.518 itu kami sudah bisa memanfaatkan saat ini kurang lebih 50% datanya valid ya untuk dapat dimanfaatkan sebagai data pengawasan, sebagai data pembanding selain dari data yang kami dapatkan dari *dashboard* SPBU. Dan itu merupakan progres yang cukup baik menurut kami karena pada saat kami memulai tugas di sini itu hanya sekitar 1.000 SPBU yang bisa kami manfaatkan datanya, tetapi sekarang sudah bertambah menjadi sekitar 2.300-2.400.

Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan sesuai dengan agenda yang akan kita bahas pada siang hari ini. Selanjutnya, kami kembalikan kepada Pimpinan Sidang.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas paparan dan penjelasannya Bu Kepala.

Tadi perlu jadi catatan ya, kita pengen tahu teknisnya ya, tadi disampaikan basisnya plat nomor ya Bu ya, terjadi pengulangan ada orang ngisi terus abis itu, nah bagaimana mengantisipasi satu mobil platnya diganti. Jadi jangan jauh-jauh, kita nggak usah jauh-jauh, genap ganjil aja banyak ya gonta-ganti ini, apalagi yang diawasi oleh Dirlantas, Kakorlantas dengan peralatan yang begitu canggih aja masih bisa jebol, apalagi BPH. Nah, ini yang harus kita ingin dalam kan gitu, salah satunya, mungkin nggak perlu dijawab Bu biar ntar jadi satu bagian yang untuk kita dalam.

Selanjutnya, untuk menyingkat waktu kami berikan kesempatan kepada seluruh anggota Komisi VII yang hadir fisik maupun yang *virtual*, dan sesuai Tatib kita berikan waktu maksimal 5 menit. Kita mulai awal dari ini pengguna ini nih, brand mobil Ibu Mercy.

Silakan PDIP.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Baik, terima kasih.

Pak Ketua yang saya hormati dan seluruh Bapak/Ibu rekan-rekan Komisi VII, Kepada Ibu Kepala BPH Migas dan seluruh jajaran Komite, Bapak/Ibu yang lain yang berkenan hadir.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Mencermati seluruh kondisi penyaluran BBM hari ini, tugas dan tanggung jawab dari BPH Migas, selain mengatur, mengawasi tapi juga pelaporannya dan terakhir adalah bagaimana melakukan *follow up* terhadap seluruh persoalan yang terjadi di tingkat bawah. Nah, apa yang kita hadapi belakangan ini selama 2 tahun terakhir, selama pandemi Covid mungkin karena terjadi *slow down* ya dari sektor industri, transportasi dan lain-lain sehingga tidak memperlihatkan gejala yang terlalu menyolok. Begitu penanganan Covid mulai berjalan dengan baik, vaksinasi mulai berlangsung di hampir semua tempat, ekonomi mulai bertumbuh dengan sangat luar biasa, transportasi mulai meningkat, gerakan ekonomi di tingkat basis baik UMKM maupun IKM jadi usaha kecil, menengah maupun industri kecil, menengah bergerak dengan sangat luar biasa.

Yang kami hadapi di tingkat bawah, saya kira ini hampir seluruh anggota Komisi VII mungkin mengalami hal yang sama ya adalah hilangnya sejumlah, bukan hilangnya ya, nggak tahu apa istilahnya ya, masalah pertalite yang hari ini mengemuka di hampir seluruh wilayah dapil kami. Saya kebetulan dari Dapil Maluku Bu, dan komunikasi kami cukup panjang dengan *brand marketing* yang ada di Ambon, Pak Wison dengan seluruh jajaran, dapat kami sampaikan sejumlah gejala terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara. Kabupaten Kepulauan Aru nampak sekali di Kota Dobo sejumlah SPBU itu antrinya panjang sekali. Kemudian di Kota Langgur di pusat Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual di pusat Kota Tual, kemudian sebagian terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sebagian Seram Maluku Tengah.

Kota Ambon saya tidak sampaikan kalau ada kekurangan di sana-sini, tapi pusat kota ya jadi masih mudah mengakses banyak hal. Apa yang dialami oleh masyarakat saat ini adalah terjadi antrian panjang, bahkan mobil nginap dari malam Pak/Ibu. Mobil nginap dari malam hanya untuk mengantri pertalite dengan terjadinya kebijakan menaikkan harga pertamax menjadi 12.000 sekian dan mempertahankan harga pertalite menyebabkan terjadi, dapat kami sampaikan terjadi migrasi yang luar biasa. Jadi, kalangan masyarakat menengah yang mungkin baru saja kuat dari sektor ekonomi karena baru melewati situasi pandemi Covid yang cukup berat, akhirnya semua migrasi balik lagi ke pertalite. Jadi, mestinya, pertalite jika tidak terjadi migrasi mungkin masih cukup stabil, tetapi dengan terjadi migrasi yang begitu hebat sampai dengan hari ini maka tidak bisa kita pungkiri hampir semua saudara-saudara kami yang ada di lapangan kirim foto amat sangat banyak, Pak Wilson mungkin udah hampir kewalahan di Ambon untuk menerima seluruh foto-foto yang saya kirim berulang-ulang dari berbagai kabupaten kota. Itu baru yang di pusat-pusat kabupaten kota Bu, kabupaten kota yang ada di Maluku belum kita bicara wilayah-wilayah teritorial yang berbasis gugus pulau, yang ada di perbatasan.

BBM satu harga yang seyogyanya harapan kami kuota pertalitenya mestinya lebih besar hari ini, saya tidak tahu ya yang dijual hari ini pertamax dengan apa namanya solar yang satunya lagi ya, yang sudah harga *market* ya. Itu dia, pertanyaannya hari ini BBM satu harga ini kami sangat harapkan mestinya diberikan pengkondisian, namanya saja ini BBM satu harga di wilayah-wilayah sulit, Bu. Namanya kalau sudah di wilayah sulit, bagaimana masyarakat diperhadapkan membeli harga BBM yang komersil harganya, pertamax dan solar apa satunya lagi yang namanya itu. Masyarakat telepon itu sampai ngamuk-ngamuk karena yang membeli di sana itu nelayan-nelayan kecil, nelayan-nelayan kecil yang keluar dengan sampan-sampan yang keluar mungkin dengan ukuran *long boat*-nya itu mungkin di bawah 1 GT, termasuk perahu-perahu nelayan. Mereka bilang, Bu, Ibu datang kunjungi kami di 11 kabupaten kota pertemuan dengan pemerintah, pertemuan dengan masyarakat, dengan kepala dinas badan, nawar-nawar untuk kalau bisa ada *Pertashop*, untuk kalau bisa ada BBM satu harga kita upayakan untuk ada di sana. Tapi, kok yang dijual dengan harga yang apa namanya ya harga komersil yang di, dan masyarakat nggak punya opsi. Yang berikut untuk penjualan BBM satu harga seperti begini Pak. Kami tidak tahu ya karena kuotanya juga dibatasi Pak, buka 3 hari sesudah itu tutup, Pak.

Jadi, mungkin kita harus evaluasi lagi pengelolaan BBM satu harga ini karena penetapan BBM satu harga kuotanya ini kan juga dibicarakan dengan BPH Migas. Jadi, ini mohon-mohon perhatian amat-amat sangat, saya percaya semua teman-teman yang lain mungkin mengalami situasi yang sama.

Yang kedua adalah untuk para petani, beberapa kawasan yang cukup luas wilayah kontinentalnya yang ada di Maluku, seperti Pulau Seram, apa namanya Pulau Tanimbar mereka mengerjakan aktivitas pertanian yang cukup luar biasa, Bu. Mereka juga diperhadapkan dengan situasi yang sama. Saya ingat persis periode yang sebelumnya waktu kita turun dengan BPH Migas, dengan Pertamina hampir-hampir 1 hari menjelang itu mau kegiatan, baik nelayan maupun petani hampir-hampir mau demo, Bu. Mereka datang itu mereka mau bawa itu sampannya itu dibawa di depan SPBU, apa namanya pertanian apa itu istilahnya, *hand tractor* mereka bawa parkir semua di muka SPBU karena cuman satu, Bu. Kita dorong berulang-ulang untuk SPBU satu harga, dibuka, dibuka, dibuka terus terutama untuk kami yang berbasis kepulauan, sampai di satu kabupaten itu cuman hanya ada beberapa desa dan beberapa kecamatan, selain itu begitu ke luar dari pusat kabupaten kota bagi kami yang berbasis kepulauan, udah pulau-pulau kecil Bu.

Jadi, pada kesempatan yang sama ini Bu, izinkan saya menyampaikan hasil reses yang kemarin. Reses yang kemarin itu saya ada di 3 Kabupaten Ambon, SBB Maluku Tenggara Barat atau Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekarang sudah berganti nama dan Maluku Barat Daya. Yang pertama untuk Maluku Barat Daya Bu, untuk Maluku Barat Daya, kami sangat berharap ada tambahan lagi titik BBM satu harga yaitu di Kecamatan Wetar Utara, Kecamatan Romang dan Kecamatan Damar. Kemudian untuk lokasi Kecamatan Lakor ada suratnya dari Pak Bupati, kami terima surat dari Pak Bupati sekaligus juga dengan rekomendasinya, 2 surat bersamaan. Untuk lokasi BBM satu harga yang ada di Kecamatan Lakor diharapkan dapat

dipindahkan ke Kecamatan Moa bagian timur karena Kecamatan Moa bagian timur sekarang ini sementara dalam proses pemekaran kecamatan berganti nama menjadi Kecamatan Moa Timur. Mengingat di Kecamatan Moa bagian timur ini hampir kurang lebih sekitar 13.000 penduduk yang ada di sana cuman 1 SPBU yang melayani, sementara di Kecamatan Lakor, izin penyaluran BBM 1 harga yang ada di sana dia mengalami persoalan yang cukup serius karena manajemennya ada di Ambon, aktivitasnya ada di perbatasan dekat Australia sana Pak dan hampir-hampir tidak terlaksana dengan baik. Dan memang sudah dikoordinasikan dengan penyalur tersebut, dia mengakui kendala yang dihadapi karena memang konsumsinya sepi sekali dan telah didapatkan kesepakatan bersama-sama dengan Pertamina, maupun dengan pemerintah daerah setempat untuk dipindahkan ke Moa Timur.

Yang berikut di Kecamatan Seram Bagian Barat, untuk di Kecamatan Seram bagian Barat, saya ikuti terus setiap penambahan BBM satu harga. Usulan penambahan ketika melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang ada di sana, ada 2 tambahan titik BBM satu harga yang hari ini cukup krusial karena mereka masyarakat nelayan kecil yaitu Kecamatan Kepulauan Manipa dengan jumlah penduduk 7.500 jiwa dan Kecamatan Kuamual belakang dengan jumlah penduduk 32.000 jiwa Bu, dan tidak ada akses BBM apapun yang ada di sana. Jadi, mohon kepada kami untuk diberikan apa namanya tambahan BBM satu harga mempertimbangkan situasi aksesibilitas yang amat sangat rumit.

Untuk kecamatan KKT Kabupaten Kepulauan Tanimbar tempat blok Masela hendak di, sementara dilangsungkan ini. Di kecamatan Kepulauan Tanimbar yang atau kita sebut yang denah ini di ujung bagian utara itu kecamatan perbatasan itu pulaunya satu pulau kecil itu namanya Pulau Fordata Bu, itu di ujung sekali. Jadi dia seperti kita dibagian dari Aru sampai ke Maluku Barat Daya itu kita sebut busur selatan, tenggara selatan yang berhadapan langsung, berbatasan langsung dengan Australia. Di ujung paling utara itu Bu, itu tidak ada BBM, titik BBM satu harga dan mereka punya kendala yang amat sangat berat. Pusat Kecamatan Fordata ini ada di Desa Romean Bu, dengan kurang lebih sekitar 5.000 sampai dengan 6.000 mendekati 7.000 penduduk, saya tidak *update* datanya. Yang terakhir, itu ada Desa Romean, Desa Adodo Fordata, Desa Sofianan Waleran dan sebagainya.

Nah, waktu Reses kemarin seluruh kepala desanya tuh datang Bu, ketemu dengan saya bukan saja urusan listrik tapi urusan BBM. Satu kepala desa itu ngomong sampai nangis, mereka mau beraktivitas agak kesulitan karena sudah di perbatasan paling ujung bagian utara udah dekat Australia sana, Bu. Jadi mohon untuk yang Kecamatan Fordata ini mendapat perhatian bagi kami.

Kemudian Bu, untuk Kecamatan Kota Dobo hari ini Kabupaten Kepulauan Aru, saya mengucapkan terima kasih yang amat sangat. Tadinya itu hanya ada satu SPBU dan terjadi monopoli bisnis yang begitu luar biasa. Selama 5 tahun sejak 2016 telah terjadi pemekaran atau penyebaran titik-titik BBM satu harga, 3 yang ada di Kota Dobo, 1 yang ada di Benjina, 1 yang ada di apa namanya Aru Utara, Kepulauan Aru, Benjina, Aru bagian Utara Tengah,

Aru Utara Timur dan yang terakhir kita resmikan periode yang kemarin itu di satu desa yang namanya kecamatan yang bertempat di Kojabi.

Satu catatan kami ada 1 kecamatan yang hari ini yang namanya Kecamatan Tabarfane Bu, Kecamatan Tabarfane ini total hampir seluruh masyarakatnya adalah masyarakat nelayan dengan aktivitas yang sangat tinggi. Pusat BBM satu harga sementara dibangun dan kami minta untuk pengawasan dilakukan secara ketat terhadap lembaga penyalur ini supaya bisa segera selesai, Bu. Dan harapan kami kalau ini dia bisa segera selesai, dia bisa mengurangi beban, bisa mengurangi beban antara Aru bagian selatan barat dengan Aru bagian tengah karena dia ada di tengah-tengah antara Aru bagian tengah dengan Aru bagian barat.

Jadi, ini beberapa catatan kami yang berkaitan dengan situasi, kondisi yang ada di seantero Maluku ini. Nah, harapan kami Bu, untuk yang kedepannya ini khusus untuk solar, khusus untuk solar subsidi dan pertalite ini mohon mendapat perhatian serius. Kemarin saya langsung berkoordinasi dengan Ibu untuk solar subsidi begitu terjadi pemotongan, itu mungkin untuk orang Jakarta pemotongan itu dianggap kecil tapi untuk kami yang ada di Maluku satu tetes BBM itu tali nafas dan tali kehidupan kami, Bu.

Jadi, saya kira itu beberapa catatan, tolong jangan pernah mengabaikan kalau ada kendala-kendala seperti begini, respon cepat dari BPH Migas itu sangat kami harapkan.

Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua, cukup banyak ini.

KETUA RAPAT:

Ini satu-satunya Mercy yang nggak mengonsumsi BBM.

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar nggak ada, lanjut ke Gerindra. Oh, Golkar silakan.

F-PG (BAMBANG HERMANTO):

Terima kasih, Ketua atas waktunya.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII.
Kepala BPH Migas dan seluruh jajarannya.

Sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan Bu, ini terkait dengan program digitalisasi SPBU. Kalau kita lihat di sini *database* yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program digitalisasi SPBU itu adalah plat nomor ya Bu, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua, saya mungkin sedikit saja menambahkan bahwa plat nomor yang dipakai oleh kendaraan Bu, sekarang ini banyak juga yang *double-double*. Kayak kita misalnya sekarang

ada plat nomor yang sebenarnya, kemudian juga ada plat nomor dinas. Kemudian, juga banyak juga di antara kendaraan yang beredar kita ini Pak, apalagi di kampung-kampung ini bukan plat nomor yang sesungguhnya.

Maka oleh karena itu saya meragukan kalau misalnya program digitalisasi SPBU ini *database*-nya itu berasal dari plat nomor. Ini perlu dievaluasi barangkali ya karena konsumen pengguna bahan bakar itu bukan hanya kendaraan, tapi juga kalau di kampung-kampung, mesin-mesin, alat-alat pertanian itu juga butuh bahan bakar. Nah, kalau digunakan untuk itu apa kira-kira landasannya. Kemudian tadi manfaatnya yang saya dengar tadi paparan dan Ibu adalah bahwa manfaat dari digitalisasi SPBU itu adalah sebagai alat untuk menagih subsidi. Bagaimana mungkin kalau *database*-nya tidak valid ini bisa dijadikan alat ukur untuk menagih subsidi, ini juga menjadi persoalan saya kira.

Kemudian, juga bagaimana nasibnya dengan Pertashop Pak, kalau kemudian alat-alat ini hanya dipakai, dipasang di SPBU sementara Pertashop itu adalah menjadi bagian daripada saluran distribusi BBM. Bagaimana nasibnya mereka ini, mereka sudah menyiapkan apa namanya menempatkan modalnya untuk buat Pertashop tapi kemudian ketika nanti program ini dijalankan, ini kan jadi masalah, ya.

Jadi, hal-hal yang tadi saya sampaikan saya kira ini menjadi bahan evaluasi saya kira Bu, Bapak dan Ibu semua. Oleh karena itu, saya mohon ini juga tidak hanya diterapkan di, walaupun nanti dilaksanakan pertama yang harus dievaluasi adalah terkait dengan *database*. *Database* kita ini data kendaraan sulit kayaknya Bu ini Bu, didapatkan oleh kita karena masih banyaknya kendaraan-kendaraan yang memang kalau di kampung ini malah tidak terdaftar di polisi, iya banyak ini.

Saya kira demikian Ketua, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi, Bu itu bener tuh, jadi jangankan BPH kepolisian aja kesulitan loh Bu memantau tiap hari itu, kadang mungkin Pak Wahyudi bisa punya 2 plat tuh yang ganjil sama yang genep. Jadi, saya pikir niatnya sudah benar, niat dasar BPH untuk memperkuat fungsi pengawasan benar bahwa digitalisasi salah satu instrumen yang baik untuk mengetatkan pengawasan khususnya bahan bakar subsidi. Namun, data dasarnya itu harus benar juga Bu, ntar jadi sia-sia jadi kalau ibarat kita niatnya mau sholat tapi wudunya salah dimulai dari kaki, salah semua itu Bu. Niatnya sudah benar makanya saya bilang bagaimana merumuskan BPH itu dasarnya itu betul-betulin, kalau plat nomor dicopot-copot Bu, ada teman-teman, mungkin saya juga begitu kan, ada punya beberapa plat.

Nah, jadi kan kita banyak itu yang RF itu ada plat dasarnya juga Bu, maksud saya tapi itu tidak dipergunakan untuk sesuatu yang melanggar. Nah, ini kalau ada 1 mobil berganti-ganti plat, mobil yang sudah dimodifikasi tangkinya diganti, maksud saya coba dibuat identifikasi itu yang melekat, tidak bisa dicopot. Misalnya saya tadi bilang kan hologram, hologram *barcode* yang nempel di kaca, begitu di angkat dia rusak, tapi jangan juga hologramnya dikasih begitu aja ntar nggak ditempel. Banyak akal menuju surga apalagi upaya-upaya oknum-oknum untuk mencari keuntungan dari subsidi bu untuk, mungkin itu ya Bu. Garis bawah bahwa data *basic*-nya harus benar-benar akurat.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra, silakan Ibu Mulan.

F-GERINDRA (R. WULANSARI):

Terima kasih, Pak Bambang.

Pimpinan Komisi VII yang terhormat.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang mulia.

Baiklah, yang terhormat Ibu Erika Kepala BPH Migas beserta seluruh jajarannya.

Pada siang hari ini, saya ingin menyinggung dan mungkin mempertebal seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, Pak Bambang itu betul program digitalisasi SPBU ini tentu sangat positif dan baik. Tapi tentu sangat butuh kesiapan di lapangan, harus sangat butuh persiapannya di lapangan baik itu SDM-nya, apakah sudah tereduksi dan apakah dapat menjalankan program-programnya dengan baik dan masyarakat juga menurut saya harus di edukasi dan bagaimana dengan *equipment*-nya, dan lain sebagainya. Kenapa kita benar-benar harus perhatikan hal ini agar program ini bisa terimplementasikan dengan maksimal.

Dan untuk halaman 24, saya melihat ini ada program pemasangan edisi LinkAja. Menurut informasi yang kami dapat nih Bu, *startup* PT Fintek Karya Nusantara dalam hal ini yang memasang LinkAja, betul Bu, betul atau tidak. Saya baca PT Fintek Karya Nusantara ini melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran, apakah hal ini bisa mempengaruhi terhadap operasional LinkAja dan akan menghambat program digitalisasi SPBU ke depan.

Selanjutnya, kita, masyarakat terakhir-akhir ini sedang begitu mendengar gencarnya Pertamina sedang menggodok pengembangan program digitalisasi MyPertamina, dengan tujuan yang sama yaitu BBM subsidi pertalite dan solar itu bisa tepat sasaran. Nah, apakah program MyPertamina itu bersinergi dengan program BPH yang sedang kita bahas pada saat ini.

Mungkin itu saja yang saya tanyakan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya, Fraksi Partai Nasdem, Kakak Rico.

F-NASDEM (RICO SIA):

Siap, terima kasih Pimpinan.

Terima kasih juga rekan-rekan sekalian, baik yang hadir secara fisik maupun *virtual*.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Paparannya luar biasa, pertanyaannya juga dari rekan-rekan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mulan dan Pak Bambang, juga Pimpinan. Ibu Kepala BPH Ibu Erika terkait dengan tadi sudah disampaikan soal plat nomor yang *double* dan lain sebagainya, mudah-mudah itu menjadi perhatian khusus dan ada inovasi lain yang dapat dibuat. Sehingga memperkuat kinerja dari BPH untuk bisa mendapatkan pelanggaran-pelanggaran lainnya akibat dari tadi kreativitas dari oknum-oknum yang ingin mempergunakan BBM subsidi.

Berikut terkait dengan dapil saya, apa yang sudah sampaikan oleh Ibu Mercy yang luar biasa terkait dengan pulau-pulau di luar, yang ada juga di Papua dan Papua Barat, begitu banyak yang masih mengalami kesulitan BBM terkait dengan subsidi seperti pernah saya sampaikan, baik di dalam konsinyering maupun RDP sebelumnya. Bahwa kalau boleh ditugaskan dibuat lagi, silakan BPH menugaskan perusahaan dari mana saja yang ada di sana untuk kemudian bisa diawasi mereka karena yang ada sekarang ini belum pernah para nelayan bisa menikmati itu dengan baik. Contohnya sudah pernah saya sampaikan, hari yang sama BBM masuk mereka ke sana, hari yang sama juga di jam yang sama belum pindah satu jam, mungkin baru setengah jam sudah tidak ada BBM-nya, katanya sudah dibeli, siapa yang beli? Pengusaha katanya, loh kok ini pengusaha yang beli, terjadi di dapil saya.

Yang berikut terkait dengan permintaan dari Bupati Maybrat yang sudah ada suratnya untuk titik BBM satu harga. Di sana katanya kalau boleh digeser, surat sudah saya sampaikan mohon jadi perhatian dan satu lagi yang terakhir adalah tadi ada titipan juga dengan Kaka Ina, dari Kaka Ina Elisabeth Kobak terkait dengan titik-titik BBM satu harga yang ada di Papua, sampai sekarang beliau belum tahu itu di mana saja, apa kabarnya dan kemudian sudah sampai di mana kalau misalnya progres-progres yang sedang berjalan.

Demikian juga dengan dapil saya pertanyaannya sama, di mana dan kenapa sampai sekarang hasil temuan yang pernah turun juga dengan BPH waktu itu ternyata SPBU tidak menjual BBM satu harga, SPBU yang ditunjuk, mereka kemudian menjual seperti biasa. Namun, kalau boleh, bukan kalau

boleh, mohon titik-titik itu disampaikan supaya dalam pada saat kita reses kita bikin jalan sekalian untuk coba mengawasi itu.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, luar biasa Pak Rico ini dari Papua Bu kalau Papua itu fokusnya BBM satu harga. Kalau di Jawa, Sumatera ini sudah satu harga, tapi satu harganya masih banyak yang dicolong-colong. Kita nggak menyalahkan BPH tapi memang di sistem masih kurang kuat, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bu Erika dan juga teman-teman anggota komite lain sistem pengawasan itu lebih diperketat, sehingga oknum yang berusaha nyolong tuh bisa kesempatannya semakin kecil.

Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa, nggak ada lanjut ke Fraksi Partai Demokrat Pak Nasir.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII.

Yang saya hormati teman-teman anggota Komisi VII.

Dan Saudara BPH dan seluruh jajaran yang hadir.

Mungkin saya menindaklanjuti dari penyampaian temen-temen yang sudah bertanya tadi. Saya melihat fungsi dan tugasnya BPH ini mengatur dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak. Saya melihat tidak terjadinya pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas karena di beberapa daerah, beberapa provinsi banyaknya peralihan BBM yang tidak pada tempatnya. BBM solar bersubsidi ini saya melihat banyak sekali penyelewengan yang dilakukan di lapangan yang tidak terkontrol dan tidak diawasi oleh BPH Migas.

Nah, saya minta mungkin berapa jumlah SPBU yang ada di Indonesia, kami minta laporannya tolong disebutkan berapa, di setiap provinsi ada berapa, nah terus berapa transaksi BBM solar bersubsidi ini setiap hari ditransaksikan oleh depo, oleh Pertamina yang diawasi oleh BPH kita minta datanya, sampai mana pengawasan yang dilakukan BPH tentang realisasi solar bersubsidi ini.

Saya melihat tadi kasus yang disampaikan dalam laporan BPH ini, kasus yang nggak tepat sasarannya dan sebelum saya sia-sia uang negara kalau digunakan untuk ini, ini tugasnya Pertamina sebenarnya. Mungkin Pertamina yang mendapatkan, Bapak cuma dipanggil tapi hasilnya BPH di depan, saya lihat nggak ada ini. Ya, jadi kuota yang dikeluarkan Pertamina per hari, kemana penyalurannya itu yang saya pertanyakan, di mana barangnya. Apakah dia ke SPBU atautkah dia ke gudangnya mereka dulu, baru di oper lagi ke mana, ini mana? Saya minta datanya. Apa yang Bapak lakukan sebagai pengawas pendistribusian BBM ini, kalau ini enggak ada gunanya BPH kita bubarin aja,

nggak ada manfaatnya gitu. Percuma negara setiap bulan mengeluarkan uang untuk BPH ini, Bapak nggak pernah ngajak kepolisian turun bersama nangkep pelaku-pelaku ini. Jadi, percuma kita bentuk BPH ini, padahal nawacitanya Bapak Presiden tuh supaya menjaga regulasi BBM ini tepat sasaran, tapi yang terjadi di bawah nggak ada, banyak sekali BBM solar bersubsidi ini tidak tepat sasarnya, malah pom bensin nanti yang jam 5 habis, kita nggak tahu ke mana nih. Kita hitung kendaraan yang masuk di situ nggak sesuai dengan jumlah yang mereka terima gitu.

Nah, kami minta ini laporan per provinsinya mana, ada satu, beberapa SPBU yang kami lihat jumlah kendaraan bisa dihitung setiap hari tapi BBM-nya habis, besok ngisi lagi, apa itu. Nah, ini kayak beliau yang nomor dua ini yang lagi ngomong, ini paham betul tentang BBM karena pelakunya beliau dulu, harusnya Bapak ajarin ini Kepala BPH biar paham, siapa pencurinya dikasih tahu, siapa pelakunya, bener kan Pak, betul ya, nah gitu.

Jadi, Pak siapa? Pak Tiko, ini sudah 30 tahun di Pertamina paham sekali. Nah, ini harusnya terungkap di BPH Migas pelaku-pelaku ini terungkap, ajak kepolisian gitu loh. Bukan MoU saja tapi di tentang ini tangkap Pak. Ini mobil subsidiya masuk ke gudang keluar nanti mobil industri, BBM-nya sudah ditukar di gudang itu, tapi enggak terungkap sampai hari ini. Untuk apa BPH ini, nggak ada manfaatnya. Kalau cuman Ibu nanti *softcopy* gambarnya diganti, lokasinya di ganti percuma gitu.

Kami minta rapat berikutnya semua PPNS Ibu itu hadirkan di sini dan seluruh GM yang ada di Pertamina kita minta hadir di sini, GM MOR-nya gitu Pimpinan. Jadi, biar *clear* ini di mana PPNS Ibu, apa yang dikerjakan para GM MOR tadi, kita audit, *clear* nggak ini hitungannya. Berapa jumlah perusahaan industri yang membeli BBM industri di semua provinsi, berapa jumlah BBM subsidi yang dibeli oleh pelaku-pelaku pedagang yang dilakukan oleh Pertamina, kita minta datanya mana. Nah, apa yang Bapak/Ibu sekalian awasin, kok bisa BBM-nya sampai pulau sana nyebrang. Padahal, enggak ada pembelian di sana gitu, tapi BBM ini sampai ke sana gitu, harganya berubah sampai di sana. Nah, siapa yang ngasih izin gitu. Padahal, Bapak mengawasi distribusinya, tapi nggak ada sampai hari ini, percuma aja BPH ini dibentuk nggak ada artinya karena nggak ada kasus satu pun yang terungkap bagaimana menjaga regulasi BBM kita ini.

Kita minta, izin Pimpinan, kita nanti di masa sidang ini kan akan melakukan reses. Lokasi reses yang akan kita kunjungi harus ada kasus yang ditemukan, kalau nggak kita bubarkan ini BPH, udah gitu aja, gampang, percuma kita kasih uang gitu loh, nggak ada manfaatnya. Bagus kita minta aja nanti Dirjen Migas membentuk Gakkumnya di sana aja kita bentuk gitu, badan pengawasannya di sana kita perkuat, unit kerjanya kita perbesar aja di sana nggak ada manfaatnya di sini karena penugasan yang dilakukan itu oleh dirjen.

Saya minta juga nanti dirjen menyurati Pertamina, semua pembelian jerigen yang dilakukan di Pertamina dihentikan, kalau tidak dihentikan, berarti BPH Migas juga nggak ada kerjanya. Malam dijual per jerigen, per jerigen dibayar 10.000, satu malam Pertamina SPBU itu sudah menuai keuntungan 10

jutaan, tapi enggak dilakukan pengawasannya, saya enggak ngerti gitu loh. Besok pagi mobil yang mau ngisi solar yang harus menikmati subsidi itu enggak dapet, mana ada Ibu sebut tadi kasus seperti ini di sini padahal kalau kita lihat semua SPBU malam melakukan transaksi, lampunya dimatiin, dirigennya numpuk di situ, mana PPNS Bapak tadi, enggak ada, mana Bapak tentang polisi, polisi itu kalau ditunjukkan ditangkap langsung, tapi kan enggak ada gitu loh.

Saya minta data semua SPBU seluruh provinsi, apa kasus semua setiap SPBU. Setiap SPBU itu melakukan transaksi itu tapi kan enggak ada yang diberikan sanksi karena mereka mempunyai keuntungan 5 juta, 10 juta per malam, 1 bulan 300 juta keuntungannya. Kami jual Pak, kami jual kok transaksi ini Pak, CCTV-nya tadi bisa, oh CCTV-nya mati lampu tadi malam, enggak tahu kita.

Jadi, kami minta Bu, laporannya jangan kayak gini, ini laporan ecek-ecek ini enggak jelas. Kita minta bulan depan laporannya mana pelaku-pelaku yang Bapak/Ibu tangkap itu karena distribusinya ini bermasalah semua. Masa kami yang menunjukkan ini Pak pelakunya, kita tahu pelakunya, Pak Tiko ini tahu, cuman kan mungkin ya gimana ya mendarah daging mungkin, agak repot juga.

Nawacitanya Bapak Presiden itu untuk menghancurkan sindikat seperti itu gitu. Jadi, kita enggak ngerti kok sampai hari ini enggak terselesaikan masalah ini gitu loh, jadi harus selesai. Kami minta apa manfaatnya kita bentuk BPH Migas ini. Nah, kalau enggak ada manfaatnya, saya Fraksi Demokrat minta ini dibubarkan saja, enggak ada manfaatnya, sayang uang negara digunakan untuk ini gitu, apalagi belum lagi daerahnya Bu Mercy, ampunlah udah. Saya Inhil itu Bu, tidak ada yang menikmati satu pun subsidi BBM bersubsidi, silakan cek Inhil itu. Semua masyarakatnya tinggal di pulau, transaksi di pulau itu berapa harga BBM-nya coba cek, apa yang dilakukan BPH, itu perairan itu Inhil itu, pasrah masyarakatnya, atau kalau enggak, kalau Ibu ini, saya rasa ibu-ibu kan lebih banyak ngomongnya daripada bapak-bapak. Kalau enggak ibu-ibunya kita tukar, bapak-bapak aja jadi Kepala BPH-nya, kita kocok ulang lagi gitu, kalau enggak kita bubarkan. Kalau yang bapaknya juga enggak bisa ya dibubarkan aja ini gitu.

Kita minta nanti, kita minta juga Dirjen Migas kita undang Pimpinan, supaya kalau Dirjen Migas mampu untuk membentuk badan pengawas yang lebih baik, mungkin yang kita sekarang lagi mau garap ...*(suara tidak jelas)*.... Nah, mungkin di situ nanti, supaya ada badan, Dirjen Gakkum sendiri untuk mengawasi regulasi ini. Jadi, bisa melakukan tindakan hukum, di ditangkap langsung penjarain, gitu. Jadi, alasan Ibu kan kami enggak bisa Pak, saya bilang loh tapi ada PPNS, PPNS itu bisa memeriksa, tinggal nelpon polisi kok, udah bisa dilakukan tindakannya. Hasil pemeriksaan Ibu itu bisa diserahkan langsung ditindaklanjuti sama kepolisian, apalagi gitu loh. Jadi, kalau enggak bisa, izin Pimpinan, kalau enggak bisa dituntaskan juga oleh BPH berarti mubazir uang negara digunakan di BPH ini. Jadi, saya, usulan saya dibubarkan saja BPH ini, kalau enggak bisa juga nanti triwulan berikutnya mengungkap seluruh penyelewengan BBM bersubsidi ini, saya rasa bagus dibubarkan karena banyaknya industri-industri yang gampang dihitung dari mana sumber BBM-nya, itu gampang sekali gitu loh. Jadi, koordinasinya tinggal ke

perindustrian, berapa jumlah perusahaan yang menggunakan BBM industri, berapa jumlah BBM yang dikeluarkan oleh Pertamina, dihitung kan, ketemu ini angkanya.

Mungkin itu Pimpinan, jadi terima kasih. Mungkin usulan saya itu aja, saya sudah.

*Wabillahittaufig wal hidayah.
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, putaran udah selesai kali ya, kita bisa langsung.

KETUA RAPAT:

Belum Bang, sebentar, masih Fraksi PKS, PAN, sebelah Abang belum. Jadi, itu Bu Kepala, intinya bahwa Komisi VII ingin memperkuat walaupun ada yang lemah dalam sistem pengawasan kita diskusikan bersama, Pak. Jadi, sebentar lagi kita mau memasuki pembahasan RUU Migas, mungkin di sana bisa ada unsur-unsur atau pasal-pasal yang bisa dimasukkan untuk penguatan pengawasan sektor migas ini. BPH ini sebenarnya payung hukumnya undang-undang loh, tapi saya kurang paham apakah masih ini. Sebenarnya, antara BPH dengan kementerian itu sifatnya koordinasi, sama seperti Badan POM dengan Kementerian Kesehatan. BPH ini *independent* di bawah presiden langsung, jadi saya tekankan bahwa BPH bukan lembaga sub dari ESDM. BPH berdiri sendiri, harus tegak berdiri kencang berlari.

Jadi, Bu Kepala tolong digarisbawahi kuatkan, kalau perlu PPNS-nya ditarik juga dari kejaksaan juga boleh, jadi langsung kayak model di KPU apa namanya yang satuan ini Gakkumdu. Jadi, langsung disiapkan penuntutannya karena saya yakin semua niatnya baik kok, cuma bagaimana caranya kita rumuskan bersama jangan membuat sebuah sistem yang tidak dihitung efek belakangnya Bu, apakah itu tepat sasaran atau ndak. Jadi, antar Pertamina juga kita dudukin bareng, mau diawasin atau nggak karena ini sebenarnya BPH badan pengatur tapi harusnya jadi badan pengawas, tapi undang-undangnya badan pengatur, gitu.

Baik, selanjutnya, Fraksi PKS nggak ada yang fisik ya. Lanjut, Fraksi Amanat Nasional.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati dan kami banggakan, Jajaran BPH Migas yang kami hormati.

Apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu saya memahami dan menyepakati bahwa banyak persoalan di BPH Migas. Tadi terakhir dari Saudara saya, kalau tidak bermanfaat dibubarkan, saya pikir manfaatnya masih banyak. Namun, ada beberapa hal perlunya keterbukaan, keterbukaan daripada BPH Migas kepada DPR, khususnya di Komisi VII. Apa sih kendala-kendala dalam pengaturan hilir migas ini, apa sih yang sesungguhnya yang tidak dapat dilakukan meskipun memahami dan mengetahui apa yang terjadi, kelemahan-kelemahan apakah dari regulasi yang ada perlu diperkuat.

Keterbukaan ini sangat penting, apakah nanti keterbukaan ini pada forum tertutup, silakan, tetapi ini kan jadi sasaran tembak daripada masyarakat maupun lembaga pengawasan seperti kami di DPR adalah BPH Migas dan prihatin kami sesungguhnya secara pribadi saya kepada BPH Migas. Apakah kecukupan anggarannya, apakah dalam konteks personilnya, apakah dalam hal penegakan hukumnya.

Ini yang sesungguhnya perlu Pimpinan keterbukaan, dibuka aja dalam forum terbatas, kami butuh ini Pak, jangan ya gegara kita untuk mempertahankan posisi kita untuk menjaga perkawanan kita dengan institusi lain, seperti Pertamina dan sebagainya ini kita diam-diam tidak membuka, dari mana sumbernya, sumber persoalan di mana, kebocoran solar, subsidi tidak tepat sasaran, pengawasan yang di hilir itu di mana sesungguhnya. Apakah di Pertamina yang diturunkan misalnya di SPBU, apakah di keagenan Pertamina, ini harus disampaikan. Kalau bapak tidak buka, pantas Saudara Nasir tadi mengatakan bubarkan saja, itu dia kenapa saya menyepakati tadi. Tapi kalau Ibu buka, kalau Bapak-bapak buka ini loh persoalan kami, dari regulasi ini, dari personil ini, dari anggaran ini, sampaikan. Sehingga kita tidak mabuk menggelontarkan sejumlah subsidi setiap tahunnya, ujung-ujungnya juga tidak tepat sasaran karena apa? Memang ada yang diselewengkan, baik dari sisi dari mulai instrumen paling bawah, pemerintahan, apakah kepala desa merekomendasikan kepada petani, nelayan dan sebagainya dinaikkan ke atas dari kecamatan, dari ini, dari kepala daerah tingkat 2 sampai ke atas.

Nah, ini satu hal saran-saran kami kepada BPH Migas, saya yakin Ibu dan kawan-kawan tidak dapat menyampaikan, nggak mampu menyampaikan. Jadi, dalam konteks pengawasan ini percuma ya Pimpinan, kita sekali seminggu ataupun 1 kali dalam 2 minggu melakukan RDP dengan beliau-beliau ini tanpa mereka tidak membuka apa yang terjadi sesungguhnya. Dan beliau-beliau ini harus dipaksa didudukkan dalam posisi forum tertutup, ini loh Pak, kami butuh ini, kami butuh regulasi, kami butuh anggaran, kami butuh personil dan sebagai-sebagainya sehingga dari mana titik tolaknya. Apakah dari SPBU, semodern apa pun proses digitalisasi ini ciptaan manusia. Ciptaan manusia itu bisa dirubah ya oleh manusia, jangankan manusia pintar manusia bodoh pun mampu merubahnya, cukup dengan mematikan lampu di SPBU, selesai, itu tidak bergerak yang namanya CCTV, tidak bergerak yang namanya digitalisasi, mati lampu sudah selesai, itu hanya satu tombol saja men-*delete* peristiwa dari *day per day*, udah selesai.

Jadi kan ini persoalan, persoalan ini kalau tidak dibuka, kalau tidak pimpinan paksa, ini tidak mereka tidak akan berani membukanya, satu, karena apa? Sifat perkawanan ini melakukan pembiaran-pembiaran terhadap apa yang terjadi, yang dilakukan di seluruh SPBU di seluruh Indonesia. Itu hal yang pertama kami koreksi, sehingga kita ini lebih efektif kalau memang melakukan mitigasi ke lapangan ya, satu.

Yang kedua, memberikan dukungan *full* kepada BPH Migas, Pimpinan, jadi tidak terlalu cepat kita untuk membubarkan tetapi kita tanya dulu. Kita minta *heart to heart* untuk bicara yang bisa membuat penyaluran subsidi-subsidi ini tepat sasaran.

Pertanyaan kami Bu ya, dari katakanlah ya dari kasus-kasus yang terjadi baik tahun 2021, 2022, 2019 yang dieksekusi. Kami tahu sumber persoalannya adalah dari SPBU, ini ada gambar *deluxe* ini, SPBU *deluxe* ini, ini eksekusinya di mana, satu. Tutupkah ini, dicabutkah izinnya, berapa yang dicabut izinnya, izin daripada izin baik izin prinsip maupun izin operasional daripada SPBU ini, berapa yang sudah dicabut kami ingin tahu, bukan hanya kasus. Kalau kasus bisa ratusan dan bisa ribuan tapi *punishment*-nya di mana, ini yang kami minta *punishment*-nya di mana, baik daripada instrumen SPBU maupun instrumen keagenan dan sebagainya yang diketahui oleh BPH Migas, yang direkomendasikan oleh BPH Migas, yang diselidiki oleh PPNS BPH Migas, kita ingin tahu kalau *zero*, ya berarti ada persoalan. Ada persoalan *mentality* yang ada di BPH Migas, ini yang kami ini. Kami *support*, kami bantu, tentunya apa yang perlu kami bantu, apa yang Ibu dibutuhkan, apa yang Bapak-bapak butuhkan dari BPH Migas. Kalau anggota-anggota Ibu yang di belakang maupun di samping ya berteman dengan SPBU, nah itu yang dikatakan tadi oleh seorang Nasir, terlalu *ewuh pakeuweuh* sekali dengan Pertamina ya sudah selesai nggak ada pengawasan. Kenapa? Ya ada saling butuh-membutuhkan, maklum negara menggelontorkan ribuan ton dan jutaan ton gula, di bawah itu udah ada semut, nggak mungkin Ibu menghalaunya dengan sapu lidi, nggak mungkin.

Nah, ini sesungguhnya *supporting* apa yang Ibu butuhkan, apa yang Ibu butuhkan? Pengatur loh, pengatur hilirisasi, distribusi. Ini yang ingin kami ketahui tadi. Justru karena itu dari kasus demi kasus 5 tahun terakhir ya, 2022 mana yang sudah dieksekusi, 2021 sampai 5 tahun terakhir apa saja yang dieksekusi terhadap temuan-temuan. Kalau Ibu buka ini kan sudah terjadi, kalau memang *zero* eksekusinya yang diketahui, kan eksekusinya ke Pertamina juga ini, bukan BPH Migas, tapi *report*-nya ada ke BPH Migas. Nah, ternyata ini kan, tadi kan hanya sebuah ini sebuah pemanis laporanlah, tapi kalau ini tidak ditutup, tidak dicabut izin operasionalnya, ya sama aja untuk Ibu laporkan. Ini yang kami ingin tahu eksekusinya yang telah terjadi, kalau dari situ kita lihat kalau memang sangat sedikit temuan tersebut, tentunya kita akan meminta kepada Pertamina apa alasannya dari sejumlah, tadi ada catatan di sini ada 2021 167 kasus, 2022 ada 74 kasus, kita akan pertanyakan dengan Pertamina ini kelanjutannya bagaimana, apakah saja dengan selesai dengan pertemanan, itu satu.

Nah, kita ingin tanya juga eksekusi karena yang mengeluarkan izinnnya adalah Pertamina, tentu yang mencabutnya Pertamina, jangan apa yang telah terjadi selama ini, yang beberapa bulan ini. Yang mengeluarkan izin usaha pertambangan adalah ESDM, yang mencabut adalah Menteri Investasi, kejamkah Menteri Investasi? Kejam sekali, padahal peristiwa demi peristiwa mereka tidak runut di bawah, tapi itu yang terjadi hari ini.

Nah, bagaimana persoalan BPH Migas? Kami ingin tahu itu ya, *punishment* daripada 5 tahun terakhir saja, 5 tahun terakhir terhadap temuan-temuan kasus ya dari situ kita dapat lihat, dari situ dari ratusan dan ribuan kasus berapa yang dieksekusi dalam penindakannya. Kalau memang *zero punishment* yang dilakukan penindakannya, berarti di BPH Migas ada masalah. Masalahnya apa itu, tentu perlu keterbukaan karena nggak mungkin ya beberapa orang bisa melakukan penindakan *punishment* terhadap kultur yang terbangun selama ini di republik ini. Kultur yang terbangun itu ya kultur penyelewengan daripada subsidi demi subsidi, baik daripada subsidi pupuk, dari subsidi komoditi pangan, maupun subsidi energi, maupun subsidi minyak dan gas. Ini sudah kultur tetapi kultur ini bisa dirubah, bisa.

Dan catatan terakhir saya adalah kultur ini dirubah Pimpinan, paling tidak melakukan sosialisasi demi sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, maupun di tengah-tengah para pengusaha sehingga inikan dalam tindakan preventifnya. Tetapi di dalam tindakan ininya, ya harus tegas begitu, untuk itu ya saya pikir lebih banyak bersosialisasi kita ke depan bersama BPH Migas.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya PPP nggak ada ya.

Baik, Pak Ramson silakan.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pimpinan dan rekan-rekan anggota dewan terhormat, Kepala BPH Migas Bu Erika ya dan seluruh Bapak-bapak Komite dan jajaran yang saya hormati.

Tadi sudah banyak disebutkan oleh rekan-rekan anggota yang terhormat mengenai pengawasan yang diharapkan dan juga yang aktual, yang belum sesuai harapan. Saya mau sedikit pertanyaan interaktif, itu kalau pengawasannya itu gimana modelnya di lapangan Bu? Misalnya mengecek SPBU, apakah ada penyimpangan atau tidak gitu terhadap penjualan BBM bersubsidi.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Iya biasanya kami mulainya itu kan dari data *dashboard* SPBU-nya dulu Pak. Jadi kan setiap bulan kami melakukan verifikasi *volume*. Itu kita punya ambil datanya dulu, kemudian dari situ kita biasanya kan bisa mengindikasikan adanya penyimpangan-penyimpangan misalnya pengisian yang berulang, kemudian ada juga misalnya pengisian dengan jumlah yang tidak wajar begitu kan. Kita kan maksimal 200 untuk 1 kendaraan besar ya, mobil 6 roda ke atas, misalnya ada mengisi 500 atau bahkan 1.000 begitu. Nah, hal yang seperti itu kita datang ke lapangan, kemudian kita apa namanya melakukan pengecekan juga melalui CCTV-nya, kita lihat rekamannya seperti itu dan juga tentu.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Maaf udah ada yang ditindak nggak Bu?

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Iya Pak.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

SPBU-nya ditindak?

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Ya, yang jelas tidak kita perlakukan sebagai subsidi, kemudian juga apa namanya dari Pertamina ya tentu sanksinya, itu ada yang tadi saya sampaikan ada yang dikurangi kuotanya, ada yang di tutup sementara seperti itu Pak.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Berarti sanksinya kurang tegas, mungkin juga perlu ditambahkan itu apa istilahnya kalau bukti penjualan, struk ya, itu sistemnya digitalisasinya ditambah dengan nomor polisi yang membeli, jadi ada itu. Jadi, kan kalau selama ini kan kalau nggak salah nggak ada, kalo sopir saya beli itu selalu kalau belinya pertamax turbo tapi kalau itu nggak ada kan nomor polisinya nggak ada.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Kalau untuk JBT, JBKP harus kita catat Pak nomor polisinya untuk semua yang membeli solar itu Pak, dicatat di EDC-nya.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Di catat di bukunya?.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Di EDC-nya Pak.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Jadi ada?

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Ada, Pak.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Jadi, ada digitalisasi ada terbukti itu, artinya bahwa nomor pol misalnya B351 itu berkali-kali ketahuan di situ.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Iya, termasuk kalau misalnya tadi yang Pak Bambang Haryadi sampaikan kalau dia nanti ganti nomor polisi seperti apa gitu? Kita bisa amati dari CCTV, mobilnya sama tapi platnya berbeda-beda itu juga beberapa kasus seperti itu.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pernah nggak dibuat sampling misalnya nomor pol yang sama kan ada ininya bisa di apa namanya langsung penyelidikan ke lapangan yang punya mobil truk itu, kebutuhannya berapa, tapi yang ditindak SPBU. Jadi, orang itu juga harus di ini diperingatkan, di bawa polisi waktu mengecek dan itu diekspos, jadi syok terapi gitu karena kalau nggak, kalau haknya normatif ya seperti tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan anggota yang terhormat. Jadi mesti ada inovasi juga, kalau soal anggaran kan bisa dibicarakan, baik dengan SPBU-nya maupun yang dianggarkan dari BPH Migas. Jadi, kalau misalnya SPBU yang terbanyak potensi kecurangan tuh di mana, terutama yang mendistribusikan BBM bersubsidi hanya Pertamina sama AKR ya Bu ya, hanya 2. Berarti sebenarnya lebih mudah pengawasannya karena tidak ikut yang lain-lain, ini tinggal bagaimana inovasi aja membuat ini kalau maaf aja, kalau bisnis *as usual* juga kadang-kadang sulit nih, memang di republik ini terlalu banyak bisnis *as usual*, jadi normatif semua, terobosan kadang-kadang agak kurang.

Ya saya hanya itu aja, saya kan sudah sejak Oktober '99 saya bergelut di sektor energi ini, meskipun kadang-kadang saya di sektor keuangan moneter di XI. Tapi saya melihat kalau memang bisnis *as usual* ya susah juga pengawasan seperti BPH Migas ini saya juga ikut melahirkannya, Undang-Undang Tahun 2001 dan juga BP Migas yang sekarang menjadi SKK Migas. Dulu poinnya sih bagus tetapi kalau bisnis *as usual* hanya tiap hari, tiap tahun tambah anggaran, tambah anggaran kan kita di republik ini begitu, berbasis kinerja katanya, diatur kinerjanya bagus, naik anggaran.

Kementerian juga begitu bukan hanya BPH Migas, diatur laporannya bagus naik lagi anggaran. Jadi, bukan apa namanya, kalau saya dulu buat

terobosan tahun 2007 saya minta berbasis *goal achievement target*, anggaran itu harus begitu. Kalau kita nggak, kalau sekarang saya cek masih itu ya Bu Mercy ya, kan di Banggar nih. Saya udah nggak di Banggar, dulu saya lama di Banggar.

Jadi, berbasis kinerja terus, diatur, administrasinya rapi naik lagi anggarannya 7% atau 10% gitu. Terus yang kedua, jangan lupa sosialisasi Bu, itu aja yang saya perlu nih, soalnya kalau pengawasan-pengawasan ini itu harus inovasi ya, harus inovasi, tapi jangan lupa sosialisasi. Kalau sosialisasi kurang terpaksa apa namanya, saya bisa menemukan ini, bukan bisa menemukan, yang saya temukan beberapa ini kelemahannya tapi nggak usahlah harus saya ini lagi ya. Yang penting jangan lupa sosialisasinya supaya rakyat lebih tahu, terutama di dapil saya kan jadi tahu, oh begini caranya kan gitu.

Itu aja Pak Ketua, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Bambang atau Pakde dulu, oh ini Pak Wali.

Monggo Pak Wali.

F-PDIP (BAMBANG DWI HARTONO):

Sedikit saja, ini terkait dengan istilah terkencing ya itu apakah tangki distributor, baik dari Pertamina, AKR atau yang lain ada GPS-nya karena kalau ada GPS-nya ketika katakanlah dari depo tertentu kemudian ke titik tertentu kan bisa dihitung itu interval waktu karena biasanya karena pinternya pengalamannya kencing, itu salah depo ke satu titik nanti mampir di tempat tertentu karena diambil separuh, kemudian diganti bahan bakar lain yang kira-kira secara kasat mata nggak bisa bedakan. Apakah itu ... *(suara tidak jelas)*... karena sebetulnya... *(suara tidak jelas)*... punya kewenanganlah untuk memaksa mereka. Sehingga teknologi bisa betul-betul memberikan keuntungan, bagi apa, distribusi BBM kita.

Terima kasih itu aja.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya Pakde, *monggo*.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan yang kami hormati.

Para sahabat Komisi VII, baik yang hadir fisik maupun *virtual* yang kami hormati, dan

Kepala SKK Migas dengan seluruh anggota Komite BPH Migas yang kami hormati dan seluruh jajarannya.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah mendengarkan masukan, input yang tajam-tajam yang luar biasa oleh para sahabat anggota dewan tentang dinamika di lapangan dan juga sampai saat ini istilahnya belum ada suatu hal yang temuan-temuan begitu yang ada di lapangan tentang terjadinya suatu apa kebocoran maupun bahkan juga terjadi oplosan. Ini kan juga terjadi antrian karena baru buka sudah tutup. Ini banyak dari beberapa aspek begitu, bisa juga jadi suatu kebocoran atau suatu hal yang secara sistematis begitu dan apa terstruktur, masif itu bisa juga terjadi.

Bisa juga karena apa kuota daripada bahan subsidi ini juga terbatas, nah ini juga perlu juga harus nanti disampaikan juga itu dari Ibu/Bapak sekalian tentang data-data itu. Kan kebutuhannya mungkin sekian ribu liter, subsidiya cuman berapa ratus ya, baru buka aja, terus antri, udah tutup lagi. Ini juga perlu harus ada data yang valid betul begitu, kalau hal ini kan tidak bisa hanya BPH Migas, untuk itu perlu datalah ya. Dan saya pikir saya kok juga ada kecenderungan juga *combine* tentang keterbatasan kuota saya pikir itu juga menjadi kendala juga yang terjadi suatu antrian-antrian. Ini juga dari BPH Migas harus memberikan *input* masukan yang tajam juga kepada apa-apa kementerian maupun ke kami di DPR untuk kita sampaikan dalam rapat kerja nanti kalau ada pemerintah, ini juga sebagai catatan.

Kedua, saya juga membaca bahwa selama ini BPH Migas melakukan pelaksanaan *workshop* atau sosialisasi nota kesepahaman dan kerja sama antara BPH Migas dan Polri. Nah, ini hal yang baik begitu tapi harus terus-menerus begitu karena kan kadang-kadang kita itu evaluasinya bagaimana, itu setiap berapa bulan sekali. Kadang-kadang kalau cuma sekali-sekali aja karena tugas-tugas yang lain juga berat tidak bisa fokus begitu, ini harus ada secara berkala begitu, evaluasi, bagaimana kerja sama-kerja sama dengan kepolisian, baik itu pusat, Polda, Polres, Polsek kemungkinan ini bisa secara berkala terus diadakan hal sosialisasi ini dan kalau di daerah dapil anggota DPRRI misalnya diajak juga anggota DPRRI untuk menyampaikan juga di dalam forum-forum itu memberikan dukungan, penguatan, *statement* politik lah gitu bahwa di daerah tersebut terjadi hal-hal kebocoran dan sebagainya.

Jadi, kalau kita memberikan suatu dorongan, kita ekspos begitu, juga karena tugas wewenang kita pengawasan, pengawasan tidak hanya BPH Migas saja tapi seluruh kinerja daripada eksekutif ini, baik kepolisian dan aparat-aparat terkait kami juga hak untuk mengawasi dan mengingatkan karena kita punya tugas konstitusi kita kan mengawasi dan juga nanti senjata kita juga di *budgeting* untuk bagaimana bisa berjalan secara efektif begitu. Ini apa diperlukan inovasi, kelincuhan juga dari pihak BPH Migas begitu karena keterbatasan *instrument* ya di lapangan dengan mengawasi berapa ribu SPBU begitu, minyak dan gas juga kalau nggak salah dan ini juga hal yang merupakan suatu harus disampaikan juga kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan di lapangan ini gitu. Jadi, ekspektasi kan masih banyak kita ya ekspektasinya ini kalau kasat mata...*(suara tidak jelas)*... ini terjadi kebocoran suatu daerah begitu karena dekat industri dan sebagainya, tetapi kok tidak ada tindakan misalnya. Nah, ini juga perlu apa, mengapa itu terjadi, diurai tadi mungkin dengan subsidi yang terbatas, kuotanya terbatas atau memang yang terjadi kerja sama atau kongkalikong begitu, nah itu di situ. Kekurangan *instrument*, infrastruktur untuk menindak begitu ya tadi dari BPH Migas sudah mengadakan suatu *workshop*, sosialisasi, ada kerja sama yang konkret bagaimana itu bisa dijalankan.

Nah, ini kan menyangkut juga nanti mungkin anggaran juga anggaran itu, tetapi kalau nanti kerja-kerjanya dan temuan-temuan yang besar-besar itu terjadi otomatis dari kami akan memberikan *support*, dorongan hal itu bisa masalah anggaran itu bisa disepakati misalnya begitu.

Ini mungkin yang menjadi tambahan saya, jadi sosialisasi, kerja sama saya pikir harus ditingkatkan karena keterbatasan daripada BPH Migas. Ini undang-undang sebetulnya karena dasarnya Undang-Undang BPH Migas sangat kuat sebetulnya dan ada kewajiban sebetulnya negara dalam hal ini instrumennya kepolisian untuk mengawal. Tetapi tadi apa kalau kita tidak secara berkala, secara rutin untuk diadakan suatu apa kerja sama dan evaluasi mungkin suka cepat lupa begitu atau ada isu-isu lain yang lebih seksi daripada ini.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

F-PG (BAMBANG HERMANTO):

Izin Pimpinan, tambahan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (BAMBANG HERMANTO):

Tadi saya mendengar Bu terkait dengan kuota per kendaraan Bu ya, alokasi per kendaraan tuh berapa banyak Bu, seharusnya.

Izin interaktif Pimpinan.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Mungkin yang dimaksud pembatasan per kendaraan Pak ya.

F-PG (BAMBANG HERMANTO):

Betul.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Jadi, sesuai dengan aturan kami untuk kendaraan roda 4 perorangan itu 60 liter per hari, kemudian kendaraan roda 4 angkutan umum itu 80 liter, sedangkan kalau angkutan bis, kemudian angkutan logistik untuk roda 6 ke atas itu 200 liter, itu aturan yang ada saat ini seperti itu.

F-PG (BAMBANG HERMANTO):

Kalau 200 liter itu kan lumayan besar itu Bu, maksud saya begini jangan sampai nanti kita memberikan kuota berlebihan. Kalau yang saya tahu itu kendaraan tronton itu yang 6 roda itu kapasitas tangkinya cuman 100 liter, jadi untuk menghabiskan satu tangki itu cukup lama, bisa jadi seharian gitu. Jadi, oleh karena itu maksud saya, jangan sampai kita memberikan kuota berlebihan, mobilnya datang, beli solarnya, kemudian tidak berangkat ataupun kalau berangkat itu masih berlebih kalau 100 liter, saya kira 100 liter itu bisa seharian untuk dihabiskan 100 liter itu. Coba nanti kalau bisa dievaluasi lagi supaya tidak *over* apa namanya alokasi.

Terima kasih.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Izin boleh menjawab ya, jadi untuk *volume* itu kan sekarang sebetulnya kami sedang menyusun aturan yang baru Pak, tetapi kita menunggu aturan hukumnya dulu, payung hukumnya yang revisi perpres itu terbit. Kemudian, nanti baru kita terbitkan perka dan juga SK mengenai pengendalian penyaluran *volume* itu, yang mana *volume* tertingginya tuh 110 Pak untuk kendaraan roda 6 ke atas karena untuk seperti bisnis angkutan umum itu butuh banyak gitu, nggak cukup juga kan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya betul Bu, jadi itu, ini jadi kayak kami itu dari dapil kami itu kayak Banyuwangi tuh kan tiap hari itu nganter cabe ke Pasar Induk Kramat Jati dan itu kalau 100 kurang kayaknya karena dia tidak boleh berhenti, kalau cabenya dia berhenti busuk cabenya, dia harus kencang, bahkan pengangkut cabe itu harus kendaraan baru Bu, nggak boleh kendaraan lama karena dia terkendala waktu soalnya. Yang kami maksud tadi adalah sistem pengawasannya aja, selama itu kuota sampai ke tangan yang benar, kendaraan umum, kendaraan pengangkut bahan makanan itu sah-sah aja karena semuanya untuk penopang kesejahteraan masyarakat, Pak.

Cuma yang kami garis bawahi tadi, sistem pengawasannya BPH punya berapa orang tenaga untuk memantau setiap hari Bu, polisi aja personilnya segitu banyak Bu, masih banyak kecolongan ganjil-genap itu Bu, apalagi untuk melototin monitor setiap hari, oh ini truknya sama colt diesel kan, mirip, ternyata beda kan. Yang saya maksud sistem kita kan sudah mudah kan, identifikasi itu kan kenapa nggak kerja sama dengan Dinas Perhubungan, misalnya dipatok di situ di KIR-nya yang tidak bisa dicopot. Jadi, sistem identifikasinya tuh melekat jadi tidak bisa diangkat, kayak KIR begitu kan di samping sisi kanan ininya langsung di situ nempel, tidak bisa itu tankinya dicopot atau *body*-nya dicopot hanya untuk mau nyolong 100 liter. Jadi, saya bilang jangan kasih ruang atau kesempatan, kejahatan muncul itu karena adanya kesempatan.

Jadi, saya minta BPH merumuskan suatu kebijakan tuh bener-bener diteliti betul, kalau dibilang hanya CCTV Pak, aduh, saya aja di rumah CCTV aja kadang kita belum tentu setahun kita lihat, kecuali ada hilang apa baru kita lihat. Nah, karena distribusi ini namanya aja Badan Pengatur Hilir, ketika hilirnya benar, saya yakin hulunya mudah. Jadi, tidak perlu lagi itu seperti yang dibilang Pak Walikota kan, jadi entar kencing di jalan, tinggal mudah DO dari Plumpang berapa, di SPBU ambil dari penjualan, identifikasi misalnya Bu, begitu kita mau nyalain ini solar, dia harus *scan* dulu ke *barcode* yang melekat di *body* dan nggak bisa dicopot. Masalah itu teknisnya gimana silakan dipikirkan, yang jelas identifikasinya ini per mobil ini nggak boleh bisa pindah atau mudah dicopot, sehingga dia melekat dengan mobilnya kan, kalau hanya identifikasinya berdasarkan plat, cetak plat, Ibu aja belum tentu bisa *detect* itu plat asli atau palsu. Bikin plat mobil di sini apa Bendungan Hilir mirip asli semua Bu, polisi aja kadang terkecoh dengan plat palsu.

Nah, maksud saya bagaimana identifikasi itu melekat dan tidak bisa, bahkan tadi saya punya pikiran bagaimana kalau nomor rangka, tapi kan nggak mungkin nomor rangka itu pasti ngumpet dan setiap mobil beda-beda nomor rangkanya, penempatannya. Kalau itu tidak akan bisa ada pemalsuan, jadi di KIR misalnya di situ nempel semacam kayak itu *peneng* apa kek, tapi nggak bisa dicopot Bu. Nah, teknis supaya nggak bisa dicopot itu Bapak/Ibu yang pikirkan, jangan kami yang pikirkan.

Jadi, yang jelas bahwa identifikasi terhadap penerima subsidi itu harus melekat, kalau kita suruh ngontrol berbasis plat nomor, Ibu butuh karyawan berapa untuk melototin setiap hari kan dan belum tentu juga platnya itu asli, ada dua, banyak kerjaan. Maksudnya kalau itu, Ibu tinggal 1, udah tinggal

ditungguin bagaimana memasang identifikasi itu bisa kerja sama dengan Dishub pada saat KIR atau dia pada saat perpanjangan kalau untuk kendaraan umum kan itu langsung cepet gitu loh, langsung ter-*detect* nah daripada dan Ibu nggak perlu lagi ngawasin ininya, kerja hilirnya lebih mudah, tinggal besok tinggal di cek kan dari Plumpang 10.000 jualnya berapa, jualnya ternyata cuma 5.000 nih yang 5.000 lagi ke mana, gampang mensinkronkan kan, keluar dan masuk. Tapi, kalau keluarnya nggak bisa dipantau ya masuknya juga nggak jelas juga Bu kan, samalah kayak Ibu ngasih anak kan, ini jajan gitu kan tapi nggak tahu pertanggungjawabannya apa, tinggal dia bikin bon palsu-palsu aja buat bayar ini, les ini, les itu kan gitu. Nah, maksud saya gitu Bu.

Jadi, kita pikirkan bersama, kami juga akan membantu seperti tadi Pak Nasril, regulasinya juga kita akan perkuat, kerja sama dengan kepolisian yaitu pemasangannya pada saat perpanjangan, dengan Dishub pada saat KIR, kan ini kan kendaraan umum, kalau mobil biasa silahkan aja lah kan. Jadi, ada identifikasi mau Ibu bikin sosialisasi malu ngisi mobil apa, pakai solar subsidi gitu kan, mereka bilang emang gue pikirin, yang penting sisanya masih banyak, nah itu Bu. Jadi, kita pengen ada sistem yang Ibu BPH buat ketika itu mau nyalain *nozzle* ke mana, ke tangki, jadi itu ada alat yang nge-*scan* dan dia terintegrasi. Oh dia hari ini misalnya 200 liter, dia udah isi di pom bensin sebelah, dia nge-*lock* sendiri. Jadi, mau diakalin gimana nggak bisa gitu loh, kecuali dia pinjem mobil yang punya inilah data ini, *barcode* ini, nah itu sulit lah sama kayak kita sekarang lah genap ganjil ya harus terpaksa harus beli mobil 2, satu beli yang ganjil, satu beli yang genap iya kan. Kalau mereka mau ngakal-ngakalin modalnya jadi sulit, mereka mau ngakalin mau nyolong tiap gitu kan, mereka harus punya kendaraan banyak dan proses verifikasinya juga harus melibatkan berbagai unsur, betul nggak ini kendaraan untuk ini kan, ada nggak kaitannya dengan misalnya ini pemilik tambang, dia alasannya ngangkut sawit, ngangkut batu bara ternyata dia hanya buat ngangkut solar dari SPBU ke tambangnya dia, dia ngakunya pengangkut sawit ternyata bukan buat ngangkut sawit, tapi buat ngangkut solar subsidi ke lokasi perkebunannya, mungkin itu Bu dari saya.

Terakhir Ibu Roro ya, silakan Mbak Roro. Mbak Roro sebentar ya Mbak Roro saya pengen menyaksikan satu ada ini, karena ini satu-satunya Mercy yang nggak pakai BBM mau menyerahkan dan ini Mercy ini tidak ini kan, yang bisa menaiki hanya orang tertentu.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Karena nggak ada BBM jadi ganti nama jadi oplet Pak.

KETUA RAPAT:

Bentar ya Mbak Roro ya, baik Ibu Roro dilanjut ya Bu Roro.

F-PG (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):

Kita berbicara mengenai subsidi secara khusus gitu ya, kita tahu bahwa idealnya sebetulnya yang tidak mampu itu mendapatkan subsidi dan yang tidak

dan yang mampu itu tidak gitu. Namun, sistem saat ini kan kita tahunya bahwa subsidi ini diperuntukkan ke barangnya langsung gitu, bukan ke individu ataupun ke konsumen gitu, konsumennya, mohon maaf. Nah, maka nanti saya harap mungkin perlu kita rombak ulang gitu, apakah ini kebijakan yang tepat nanti bersama dengan kementerian ataupun Menteri ESDM.

Nah, maka kembali lagi mengenai penyalahgunaan Ibu, saya selalu menyoroti hal yang sama selalu karena ini cukup memprihatinkan bagi saya gitu ya karena kemarin kunspek kita ke TBBM Cikampek, kita akhirnya menemukan bahwasanya ada kendaraan yang datang ke sebuah SPBU, bahkan 10 kali dalam 1 hari gitu dan ini terjadi oleh beberapa kendaraan. Nah, maka saya itu apa ya, saya merasa selama ini kurang ada tindakan yang cukup serius untuk mengatasi permasalahan seperti ini dan saya yakin ini tidak hanya terjadi di satu tempat aja, banyak sekali SPBU lainnya yang mungkin kita tidak terlalu termonitor gitu ya kejadian-kejadian seperti ini. Nah, maka saya ingin tahu gitu sejauh ini apa sebetulnya yang dilakukan oleh BPH Migas untuk mengatasi permasalahan seperti itu dan tindakan serius apa saja yang dilakukan gitu, apakah, karena saya merasa harus ada keterlibatan penegakan hukum, lalu kemudian dengan polisi gitu ya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Apalagi ini kan sangat menghambat dengan kita berharapnya BBM ini terdistribusi dengan baik, sesuai dan tepat sasaran tapi dengan hal-hal seperti ini justru menghambat, ya kan menghambat proses tersebut.

Lalu, kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan mengenai sistem *monitoring* di wilayah Indonesia Timur. Tadi, Ibu Mercy seperti biasa selalu memperjuangkan untuk wilayah Indonesia Timur dan saya rasa perlu kita kawal bersama gitu ya, karena saya berharap nanti mohon pertimbangannya juga Pimpinan dalam hal ini agar kita juga bisa melakukan kunjungan spesifik di wilayah Indonesia Timur untuk melihat secara langsung gitu, kalau misalnya tidak terdistribusi secara merata itu di bagian mana saja walaupun tadi sudah dipaparkan secara eksplisit gitu ya oleh Bu Mercy, tapi ada baiknya kita juga supaya ikut merasakan gitu penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah daerah terpencil. Jadi, ini penting sekali untuk kita perhatikan bersama.

Dan yang terakhir tentang penyaluran JBKP ya Bu ya, jadi jenis BBM khusus penugasan pertalite yang saat ini juga tengah dibahas kategori sebetulnya yang layak menerima jenis bahan bakar tersebut. Saya ingin menanyakan kepada Ibu untuk bisa dilaporkan kepada kami semua juga, sejauh mana sebetulnya progres pembahasan penentuan kategori tersebut, lalu kemudian bagaimana dari segi *timeline*-nya, kapan akan selesai, lalu kemudian bagaimana sosialisasinya kepada masyarakat, lalu kemudian kapan akan ditetapkan. Nah, ini saya butuh semacam informasi dan *update* dari Ibu dan teman-temannya hadir.

Lalu, kemudian saya sebetulnya tadi apresiasi Pak Muchtarudin dari Golkar juga, dari Fraksi Golkar menyampaikan digitalisasi gitu dan yang seperti yang saya ketahui bahwasanya pembelian BBM itu akan menggunakan aplikasi MyPertamina ya kalau tidak salah, supaya distribusi jenis BBM itu bisa lebih terukur dan juga terlacak, lebih tepat sasaran harapannya ya. Nah, maka

saya ingin mengetahui, apakah ini sudah diterapkan, lalu kemudian jika sudah dilakukan di wilayah mana saja, lalu kemudian ke depannya ini *project* dalam 1 tahun atau 5 tahun ke depan seperti apa gitu, kendala-kendala apa yang mungkin akan kita alami ketika kita melakukan proses digitalisasi tersebut. Ini saya rasa juga penting sekali untuk kita apa namanya telusuri karena ya pada intinya kalau kami di Komisi VII kan yang penting BBM itu tersedia ya, tersedia, murah dan juga tepat sasaran gitu. Jadi, 3 hal itu kita berharap bahwa BPH Migas bisa andil dalam berperan untuk bisa melakukan ketiga hal tersebut.

Sekian dari saya, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian yang disampaikan yang terhormat Ibu Roro.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Terima kasih atas tanggapan, pertanyaan dan pandangan, nggak ada yang lain ya ini.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, ST.):

Pak Ketua, yang mengganti Pak Ketua. Pimpinan komisi sementara saat ini, saya tambahkan saja, mungkin ini juga menjadi catatan. Selain persoalan masalah distribusi BBM subsidi di wilayah daratan, situasi yang di wilayah kepulauan Bu, dalam pengalaman satu contoh kecil ya di Aro misalnya satu SPBU satu harga itu dia dapat kuota 3.000 kiloliter ya, tetapi saya tidak tahu ya 3.000 kiloliter artinya per tahun ya, Bu. Ternyata per bulan dia hanya diberikan oleh Pertamina kurang lebih sekitar 150 kiloliter, jadi kalau di *totally* per 12 bulan kurang lebih sekitar hanya 1.800 kiloliter. Jadi, artinya dari distribusi dari awal, dari Pertamina aja sudah tidak cocok dengan kuota yang dia terima, itu yang pertama.

Yang kedua, BBM yang satu harga yang ada di wilayah kepulauan pulau-pulau kecil ini Ibu begitu didistribusikan sampai ke pulau-pulau yang bersangkutan atau pusat-pusat gugus yang bersangkutan, rentan terjadi kehilangan penyunatan di tengah laut Bu, kalau yang biasanya kencing di darat ini kencing di laut iya dan ini betul-betul cukup memprihatinkan. Begitu buka 1 hari abis, besok nggak ada jualan lagi Bu dan ini diteriakin berulang-ulang.

Jadi, ini cuman beberapa catatan-catatan sebagai tambahan karena tadi kan itu banyak sekali yang berbasis daratan ya, kalau yang berbasis kelautan modelnya yang kayak gini Bu. Nah, harapan kami karena BPH ini tidak punya struktur kerja sampai di tingkat provinsi, kabupaten, kota, saya nggak tahu apakah perlu dibentuk satuan khusus misalnya di kementerian kita dorong misalnya atau lintas kementerian BPH misalnya membentuk semacam satuan

tugas khusus, sehingga penanganan yang berurusan dengan urusan distribusi BBM ini, terutama BBM subsidi tepat sasaran. Mungkin kebijakan dari BPH-nya udah bener, kuota-kuota udah diberikan, tapi begitu turun sampai ke bawah kejadiannya tidak sesungguhnya.

Yang ketiga, ini berkaitan dengan terra meteran, jangankan untuk solar, jangankan untuk solar, untuk pertalite, pertamax dan yang lain-lain. Mitan, minyak tanah baru bulan-bulan kemarin itu saya koordinasi panjang banget dengan Pak Wilson di Ambon karena terra meterannya ternyata tidak sesuai dengan padahal itu cuma minyak tanah, Bu. Nah, para penjual agen minyak tanah ini berapa sih untungnya dari satu gentong minyak tanah itu, mungkin puluhan ribu, nggak tahu berapa ratus ribu, cuman kecil keuntungannya, marginnya. Jadi, kalau diambil lagi karena tidak di terra kadang-kadang itu yang *dealer* utamanya itu, supplier utamanya udah ambil dari Pertamina mereka bawa ke tempat apa ya penimbunannya atau tempat *storage*-nya di perusahaannya, nanti mobil-mobil itu datang ngambil ke mereka. Begitu ngambil ya kita kan nggak lihat apa yang terjadi di dalam, banyak laporan masuk di sini Bu, begitu mereka timbang ternyata ada yang kurang berapa dan itu cukup besar selisihnya.

Ada beberapa yang memberikan laporan dan saya teruskan semua ke Pak Wilson untuk segera diselesaikan, bila perlu kalau ini masih kejadian *blacklist* gitu. Jadi, supaya jangan mereka pikir karena mereka pemegang agen besar, satu-satunya semua orang punya tumpuan yang bersangkutan itu jadi semena-mena terhadap agen-agen yang kecil. Untuk saya, saya ini mainannya ini di apa namanya minyak tanah untuk masyarakat kecil kalau mereka udah nggak yang besar-besar, elpiji kita nggak ada disana, yang lain. Jadi, permasalahannya masuk kalau tidak minyak tanah, solar subsidi atau pertalite yang hari ini kesulitan.

Jadi, saya kira itu tambahan dari kami Bu, itu yang ketiga soal terra meteran dan tata cara distribusinya. Mestinya pada saat distribusi ke agen penyalur yang lebih kecil lagi kan harus kelihatan antara yang di itu dengan masyarakat yang agen yang menerima BBM-nya dengan apa ya *pickup-pickup* kecil yang mereka bawa gitu loh. Bisa saja yang di meteran itu udah benar, begitu sampai di tempat dihitung ulang lagi ternyata salah, ditimbang ulang lagi ternyata salah. Jadi, pola terra meteran ini tolong diperhatikan juga.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI:

Terima kasih yang terhormat Ibu Mercy Barends.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Terima kasih atas tanggapan, pertanyaan dan pandangan yang sangat tajam, dalam dan dalam sekali oleh para anggota Komisi VII.

Selanjutnya, kami persilahkan kepada Kepala BPH Migas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari anggota Komisi VII, mungkin secara garis besar begitu ya sahabat, sehabis itu dengan tertulis, jawaban tertulis. Sekarang mungkin Ibu bisa jawab secara garis besar begitu, selanjutnya nanti dijawab secara tertulis.

Waktu dipersilakan, *monggo* Ibu.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Baik, terima kasih Pimpinan.

Kami mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari para anggota dewan yang terhormat, tentu itu menjadi informasi penting bagi kami untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki cara kerja kita ke depan begitu ya. Jadi, untuk pengawasan yang sekarang kita lakukan memang kami sadari ini belum optimal, belum maksimal ya Pak ya. Sehingga, kemudian juga salah satu yang kami lakukan adalah dengan memperbaiki aturan karena memang banyak juga hal ya yang terjadi di lapangan itu karena adanya aturan mungkin yang kurang jelas gitu kan ya, aturan yang abu-abu begitu. Sehingga, kemudian pada saat implementasinya di lapangan kemudian bisa dimanipulasi, begitu kan. Itulah sebabnya kemudian sebabnya kami merevisi berbagai aturan ya dari mulai payung hukum tertingginya, Perpres 191/2014, kemudian juga kami menyiapkan aturan turunannya berupa perka, kemudian SK pengendalian.

Termasuk juga nanti penggunaan IT yang tadi disebutkan bahwa ke depan itu kami memang akan menggunakan IT yang sudah siap dalam hal ini kalau di Pertamina itu menggunakan MyPertamina begitu ya. Sehingga ke depannya semua konsumen itu yang akan menggunakan JBT ataupun pertalite, ataupun JBKP itu harus melakukan registrasi di dalam aplikasi tersebut. Jadi, nanti akan ada identifikasi bagi pengguna gitu kan, konsumen pengguna kalau tadi yang disampaikan Pak Bambang Haryadi itu ditempel begitu ya, itu nanti bentuknya tidak ditempel tapi akan ada QR code seperti kita yang kita tahu kayak Peduli Lindungi seperti itu kan. Jadi, nanti kalau mau membeli itu harus bisa menunjukkan QR code di *handphone* gitu, tapi kemudian apa tadi Mbak Roro menanyakan kira-kira kendalanya apa? mungkin kendalanya kan masalah jaringan seperti itu ya, kemudian juga mungkin nanti di pelosok-pelosok mungkin orang nggak punya HP seperti gitu, nanti itu akan kita cari jalan ke luarnya, mungkin kembali ke manual seperti memasukkan nomor polisi seperti itu.

Jadi, upaya dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan untuk supaya lebih tepat sasaran itu tentu kami dikerjakan Pak, tetapi mungkin itu memang tidak seperti membalikkan telapak tangan gitu ya, itu butuh proses, butuh kerja sama dengan berbagai pihak juga dan kemarin pada saat kita apa menyusun usulan revisi perpres itu juga kita melibatkan banyak pihak begitu ya kementerian-kementerian, kemudian juga kepolisian, perhubungan gitu ya untuk merumuskan seperti apa sih aturannya yang pas seperti itu.

Kemudian, juga tadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Nasir, kebetulan Pak Nasirnya nggak ada ya tentang PPNS. Kami juga memang sedang berupaya untuk memberdayakan begitu ya, lebih memberdayakan kalau selama ini mungkin belum muncul ya kita akan terus dengan mengadakan apa namanya koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan begitu untuk memberdayakan atau meningkatkan kemampuan para PPNS kami.

Kemudian, tadi Mbak Roro terakhir menanyakan sejauhmana progres aturan pertalite, itu termasuk di dalam revisi perpres yang kami usulkan Pak. Jadi, revisi perpres yang baru itu kan akan mengatur selain dari mengidentifikasi ulang konsumen pengguna dari solar ya, kita akan apa melakukan perubahan terhadap siapa sesungguhnya yang lebih berhak untuk solar. Kemudian, juga kita akan mengatur konsumen pengguna dari pertalite.

Nah, sampai saat ini memang belum ada apa namanya jadwal untuk pembahasan ya jadi itu progresnya sudah kami sampaikan melalui Pak Menteri tentunya, Menteri ESDM sudah disampaikan kepada presiden tetapi kami masih diminta untuk menyajikan dampak-dampaknya seandainya itu nanti diterapkan gitu ya, dampak sosialnya terutama. Nah, itu mungkin setelah kita sampaikan itu dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan. Sebenarnya, kami mempunyai target dari BPH sendiri, kami ingin itu mulai bulan Agustus atau paling lambat September itu sudah bisa diberlakukan Pak, tapi tentu saja kewenangan itu bukan di kami karena itu perpres. Jadi, kami tunggu saja dipanggil untuk melakukan pembahasan itu, itu yang melalui progresnya.

Kemudian, untuk tadi yang disampaikan Bu Mercy ya mengenai Indonesia Timur tentu itu akan menjadi perhatian kami Ibu, khususnya yang BBM satu harga ternyata tidak menjual apa menjualnya itu adalah JBU begitu ya karena secara aturan seharusnya menjual JBT gitu kan, nanti akan kami cek Bu, apakah memang di sana yang dijual itu bukan JBT gitu ya. Kemudian juga beberapa tadi apa namanya lokasi yang barangkali akan dilakukan relokasi juga nanti akan kami lihat kemungkinannya dan kita usulkan kepada Dirjen Migas karena penentuan titik-titik mana yang akan kita bangun itu ditentukan oleh Dirjen Migas.

Saya rasa itu Pak secara garis besar tanggapan dari kami dan nanti kami akan sampaikan jawabannya secara tertulis untuk masing-masing pertanyaan dari anggota dewan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Kepala BPH Migas.
Para sahabat akan menambahkan lagi atau sudah cukup? Cukup.

Baik terima kasih.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Demikian jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Kepala BPH Migas, apabila tidak ada hal lain yang perlu disampaikan maka kami akan bacakan draf kesimpulan rapat dengar pendapat, sebagai berikut.

Draf Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Kepala BPH Migas, Kamis 23 Juni 2022.

1. Komisi VII DPRRI mengapresiasi kinerja BPH Migas yang telah berkoordinasi berbagai sektor terkait dalam rangka menjamin kehandalan pendistribusian BBM selama bulan Ramadan dan libur lebaran tahun 2022.

Kedua, Komisi VII

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI :

Fraksi sekalian itu mungkin *double* ya, berbagai sektor terkait dalam rangka kelihatannya kok, coba redaksinya, iya sudah terkait dalam rangka.

KETUA RAPAT :

Sektor dalam rangka, ok, betul, lanjut.

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BPH Migas untuk meningkatkan kerja sama dengan Komisi VII DPRRI, aparat penegak hukum dan media dalam rangka mengungkap dan menindak tegas praktek-praktek ilegal, seperti penimbunan dan penyelewengan BBM bersubsidi.

Ada koreksi atau tambahan Ibu Mercy, Pak Bambang, Bang Rico, Mas Rico, Bang Ramson, cukup, ketok ya?.

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan evaluasi *database* dan menggalakkan pemanfaatan program digitalisasi SPBU dalam rangka meningkatkan kinerja BPH Migas terhadap pengawasan kegiatan pendistribusian BBM di SPBU.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Ada masukan Pak Ketua, jadi Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan evaluasi *database* dalam menggalakkan pemanfaatan program digitalisasi SPBU, koma, terra regular, terra apa namanya istilahnya itu, terra atau kalibrasi, kalibrasi meteran ya, kalibrasi meteran bagi, kalibrasi meteran, bagi yang belum ada proses digitalisasinya ini juga penting gitu loh. Jadi, kalibrasi meteran bagi yang belum melakukan, bagi yang belum mengimplementasikan program digitalisasi secara apa ya, secara berkala, secara berkala dan bertanggung jawab gitu, secara berkala dan bertanggung

jawab dalam rangka meningkatkan kinerja BPH Migas terhadap pengawasan. Iya 2 hal ini kan, satu mendorong digitalisasi bagi yang sudah siap, dua yang belum tiba pada proses digitalisasi kalibrasi meteran ini harus jalan rutin, nggak bisa ditinggalkan kalau nggak, kita yang di wilayah jauh-jauh ya korban terus gitu loh. Digitalisasi ini kan jalan wilayah-wilayah yang sudah maju.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Mungkin frasa menggalakkan diganti mengoptimalkan.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Kalau kalibrasi itu ranahnya Deperindag Ibu ya, Perdagangan iya. Mereka yang mengharuskan dilakukan kalibrasi untuk penjualan terra metrologi.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Berarti koordinasi atau menyampaikan kepada Menteri Perdagangan. Ya mungkin koordinasi.

F-PDIP (BAMBANG DWI HARTONO):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F-PDIP (BAMBANG DWI HARTONO):

Mungkin kalau koordinasi bagusnya dibikin nomor tersendiri kali ya, agar tidak rancu mungkin Bu.

KETUA RAPAT:

Baik, kita kembalikan ke awal begitu habis itu ada sendiri.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Poin tersendiri aja setelah itu fokus pada digitalisasi mungkin ya, *database*-nya mungkin *database* konsumen pengguna begitu ya.

KETUA RAPAT:

Guna mengoptimalkan, baik saya baca.

3. Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan evaluasi *database* konsumen pengguna, guna mengoptimalkan pemanfaatan program digitalisasi SPBU dalam rangka meningkatkan kinerja BPH Migas terhadap pengawasan kegiatan pendistribusian BBM di SPBU.

Setuju, Ibu?

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.):

Istilahnya konsumen itu pengguna.

KETUA RAPAT:

Penggunanya hilang.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K, M.Si):

Istilah di perpresnya konsumen pengguna.

KETUA RAPAT:

Oke, baik konsumen pengguna betul itu satu, oke.

(RAPAT : SETUJU)

Keempat, komisi, tadi yang tadi, apa.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

(pembicara tidak memakai mic...).

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kalau boleh saya nimbrung.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Ramson.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Institusi terkait agar SPBU yang belum mengimplementasikan program digitalisasi dapat dilaksanakan kalibrasi meteran secara berkala agar SPBU yang belum mengimplementasikan program digitalisasi dapat dilaksanakan atau dapat dilakukan kali apa tadi, kok hilang lagi, kalibrasi meteran secara

berkala kan gitu dan bertanggung jawab, bertanggung jawabnya masih perlu nggak tuh.

KETUA RAPAT:

Tepat sasaran, mungkin Ibu BPH Migas.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Iya saya agak, ini kan kalau baca ini seolah-olah kalau sudah mengimplementasikan, apa sudah pakai program digitalisasi terus nggak perlu gitu ya. Sebetulnya kan semuanya tetap ada penerraan setiap 6 bulan Bu, baik yang sudah maupun belum, iya. Mungkin memonitor, kami memonitor bahwa aturan 6 bulan sekali itu harus diterapkan gitu kali Bu ya, karena kalau gini ya kan Pak ya.

KETUA RAPAT:

Baik. Ibu bantu.

Ini kan juga sebagai suatu evaluasi bahwa daerah tersebut sesuai nggak kuotanya nantinya.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Ini kan sebetulnya aturannya kan sudah ada aturannya harus dilakukan Bu ya, mungkin kita harus memastikan itu dilakukan gitu kali ya. Kalau seperti ini kan agar dilakukan kalibrasi seolah-olah belum pernah dilakukan gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa yang aturan bahwa 6 bulan sekali itu harus dilakukan terra itu kita pastikan dilakukan ya. Sesuai aturan aja gitu barangkali Bu ya. *Oke*, dilakukan sesuai aturan.

KETUA RAPAT:

Langsung *straight to the point* sesuai dengan aturan, baik ya saya baca kembali.

4. Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan koordinasi intensif dengan institusi terkait agar kegiatan kalibrasi meteran secara berkala dilakukan sesuai aturan untuk memastikan kuota BBM tetap jumlah dan tepat sasaran.

(RAPAT : SETUJU)

5. Komisi VII DPRRI meminta Kepala BPH Migas untuk melakukan evaluasi pengelolaan BBM satu harga demi mewujudkan, keadilan energi bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah kepulauan dan daerah 3T, khususnya daerah 3T.

Setuju, ketok.

(RAPAT : SETUJU)

6. Komisi VII DPRRI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPRRI dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022.

Setuju Ibu?

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

F-NASDEM (RICO SIA):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Rico.

F-NASDEM (RICO SIA):

Izin Bu Erika, tadi terkait dengan tadi titik-titik yang ada di Papua, Papua Barat maupun di daerah tertinggal seperti misalnya yang tadi Ibu Mercy sampaikan terkait dengan SPBU yang satu harga, mohon jawabannya dilampirkan di dalam tertulis tadi.

Terima kasih.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Jadi, titik-titik yang sudah disetujui untuk 2022 ya Pak ya, yang sudah ada ya, *oke*.

KETUA RAPAT:

Baik, demikian pembahasan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI pada hari ini, sebelum mengakhiri rapat kami persilakan Kepala BPH Migas untuk menyampaikan sambutan penutup.

Kami persilahkan, Ibu.

KEPALA BPH (ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.) :

Baik, terima kasih.

Jadi, sekali lagi kami dari BPH Migas menyampaikan terima kasih banyak kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang telah memberikan masukan-masukan, saran-saran tentunya bagi perbaikan kinerja dari BPH

Migas ke depannya dan kami akan terus berupaya tentunya untuk memperbaiki bagaimana mekanisme pengawasan itu di lapangan, supaya tujuan untuk mendistribusikan BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BPH Migas atas kerja samanya yang baik dalam rapat ini.

Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat dan solusi bagi permasalahan yang ada di bidang hilir migas. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI pada hari ini saya tutup.

Billahittaufig wal hidayah.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.23 WIB)

a.n. Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002